

KLANISASI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(STUDI KASUS POLITIK KLAN H. ANDI MASDAR PASMAR)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Satu Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HABIBA

NIM : 30600112031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

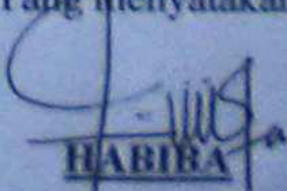
Nama : Habiba
Nim : 30600112031
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Program Studi : S1
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Judul Skripsi : Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar
(Studi Kasus Politik Klan H.Andi Masdar Pasmara).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Makassar, 5 Maret 2016

Yang menyatakan



HABIBA

NIM : 30600112031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “KLANISASI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS POLITIK KLAN H.ANDI MASDAR PASMAR)”. Yang disusun oleh HABIBA, Nim: 30600112031, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2016 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

MAKASSAR, 24 MARET 2016

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Muh.Saleh Tajuddin, MA.	(.....)
Munaqisy II	: Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Wahyuni, S.Sos, M.Si	(.....)

Diketahui oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

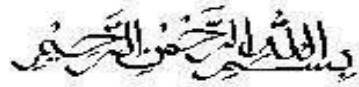
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA

NIP: 19590704 1989031 1 003

Kata Pengantar



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya berupa kecerdasan pikiran dan kekuatan intelektual, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang sangat sederhana ini. Tidak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. bersama seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga, selalu tercurahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Penulisan skripsi ini yang berjudul: “Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H. Andi Masdar Pasmari)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Jurusan/Program Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mengalami banyak kesulitan. Akan tetapi, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, utamanya ibu dan bapak pembimbing dan rekan-rekan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghaturkan ucapan terima kasih kepada: Kedua orang tua penulis, ayahanda H.Muh.Daali dan ibunda Hj. Halimah, penulis haturkan penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta

pengorbanan mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan serta disertai do'a yang tulus kepada penulis. Juga kepada adikku tercinta Rafika, Ramadani dan Nur Fadilah, terima kasih atas do'a, kasih sayang, motivasi serta bantuan yang diberikan selama penulis melaksanakan studi.

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah mencurahkan segenap perhatian dalam membina dan memajukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H.Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, serta wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi. M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan Bapak Syahrir karim. M.Si, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi. M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Wahyuni, S.Sos,M.Si selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, khususnya para Dosen Ilmu Politik dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.

6. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
7. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. H. Sarja, M.Si. Selaku staf ahli bupati yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak Kantor Bupati Polewali Mandar dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi sumber informasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik khususnya Ilmu Politik kelompok 1-2 angkatan 2012 (Fatmamawati Rasyid, Jumriani, Sri Sumarni Sjahril dan St.Nurhaeda) yang selalu memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran dan kerja sama selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah Swt, penulis panjatkan do'a, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin...

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR !

DAFTAR ISI !!

ABSTRAK !!!

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. kegunaan penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka teori	18
G. Metode Penelitian	26

BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SILSILAH

KELUARGA ANDI MASDAR PASMAR

A. Profil Kabupaten Polewali Mandar	31
1. Keadaan Geografi dan Iklim	44
2. Pemerintahan	45
3. Penduduk dan Ketenagaerjaan	49
4. Sosial	51
B. Silsilah Keluarga Andi Masdar Pasmar	52

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Pembentukan Klan Politik Andi Masdar Pasmari.....	58
1. Munculnya Andi Masdar Pasmari Dalam Politik Polmas/Polman	60
2. Regenerasi Politik Klan Andi Masdar Pasmari	61
B. Klanisasi Politik Andi Masdar Pasmari	69
1. Melalui Pilihan Legislatif	70
2. Melalui Partai/Organisasi	71
3. Melalui Pilkada/Pilgub	73
C. Faktor Penentu Klan Andi Masdar Pasmari	74
1. Modal Politik	75
2. Modal sosial	77
3. Modal Ekonomi	79
4. Modal Simbolik	80

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama : Habiba
Nim : 30600112031
Judul : Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar
(Studi Kasus Politik Klan H.Andi Masdar Pasmr)

Skripsi ini berjudul Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Politik Klan H.Andi Masdar Pasmr). Judul ini dilatarbelakangi karena hadirnya keluarga Andi Masdar Pasmr di ranah politik yang tidak pernah berhenti sampai sekarang ini, keluarga ini tidak pernah ketinggalan untuk terlibat di dunia perpolitikan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga keluarga ini membentuk sebuah politik klan, maka dari itu yang menjadi masalah inti dari skripsi ini adalah bagaimana pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmr di Kabupaten Polewali Mandar dan apa yang menjadi faktor atau dasar sehingga eksistensi keluarga Andi Masdar Pasmr ini tetap bertahan di ranah politik sampai saat ini. Maka dari itu tujuan dari skripsi ini adalah untuk mencari jawaban dari masalah inti tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang terjadinya pembentukan politik klan di keluarga Andi Masdar Pasmr dan faktor apa yang menjadi dasar sehingga eksistensi keluarga Andi Masdar Pasmr tetap bertahan di ranah politik sampai saat ini. Adapun data yang didapatkan adalah bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu diperoleh melalui kajian literature pustaka, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan empat teori yaitu teori elit, teori kekuasaan, teori sistem kekerabatan dan teori modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan klan politik keluarga Andi Masdar Pasmr dimulai dari keterlibatan Andi Masdar Pasmr dalam dunia politik. Keterlibatan ini dilanjutkan oleh generasinya baik oleh putra-putrinya, menantu maupun saudara-saudaranya. Keterlibatan mereka di ranah politik itu memiliki banyak jalur yang dilaluinya seperti melalui jalur legislatif, jalur partai/organisasi maupun jalur pilkada/pilgub sehingga itu yang menyebabkan salah satu bukti terjadinya klanisasi di keluarga Andi Masdar Pasmr. Eksistensi keluarga Andi Masdar di ranah politik sampai saat ini tetap bertahan disebabkan beberapa faktor diantaranya : mereka menggunakan modal politik (dukungan dari partai yang mereka masuki dan organisasi yang mereka pimpin), modal sosial (dukungan dari masyarakat yang sangat besar, sebab keluarga ini memiliki jaringan yang kuat di lingkungan masyarakat), modal ekonomi (selain dari golongan bangsawan keluarga ini merupakan pengusaha terbesar di Polewali Mandar salah satunya yaitu pengusaha minyak bumi) dan modal simbolik (mereka sangat dihormati oleh masyarakat sebab mereka berasal dari keturunan puang/mara'dia, dimana keturunan ini dulunya bahkan sampai saat ini menjadi suri tauladan masyarakat Polewali Mandar).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “politik klan” mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah “klan” juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik” dalam studi lain. Belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan secara spesifik. Pada umumnya, kata “klan” berarti keluarga/kelompok atau suku. Dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, clan berarti anak. Sementara itu, kata “klan” lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai sebuah kelompok sosial yang permanen berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama.¹

Terbentuknya politik klan disebuah daerah seharusnya perlu dihilangkan, sebab terbentuknya politik klan merupakan sebuah permasalahan yang berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya. Akan tetapi, jika klan tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan, tak

¹ Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. (Yogyakarta : Polgom, 2014), hal. 13.

masalah dan memberikan sebuah ruang tertentu dimana orang lain juga masuk. Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki kompetensi, merupakan kesalahan besar. Akan tetapi, realitanya yang ada saat ini terbentuknya politik klan bukannya dihilangkan melainkan terbentuknya politik klan semakin bertambah di sebuah daerah sehingga terkadang tidak ada ruang tertentu dimana orang lain juga masuk.

Salah satu daerah yang membentuk sebuah politik klan adalah Kabupaten Polewali Mandar. Terbentuknya politik klan di Polewali Mandar didominasi oleh tiga klan, salah satunya adalah klan keluarga Andi Masdar Pasmal. Politik klan pada dasarnya hadir karena tak bisa dilepas dari pilihan rakyat. Oleh karena itu, klan keluarga Andi Masdar Pasmal hadir di pemerintahan karena pilihan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba melihat bagaimana reproduksi kuasa keluarga Andi Masdar Pasmal berlangsung atau bagaimana keluarga ini dapat hadir dalam politik.

Proses demokratisasi selalu menghadirkan wajah ganda. Di satu sisi ia dapat menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik dan nyata (dibandingkan dengan era sebelumnya), tetapi di sisi lain, tidak jarang kelompok yang selama periode rezim non-demokratik berkuasa (yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik) mulai memanfaatkan kondisi untuk kepentingannya sendiri. Impaknya dengan mengatasnamakan keputraderahan, otonomi daerah, distribusi kesejahteraan yang

merata dan lainnya, mereka justru merampas seperti halnya rezim otoritarian yang pernah berkuasa pada masa-masa sebelumnya.²

Daerah merupakan arena persiapan untuk meniti karir lanjutan dibidang politik dan pemerintahan tingkat Nasional. Bagi masyarakat lokal, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat untuk menentukan pilihan politiknya. Pemilihan seorang politisi lokal untuk menduduki jabatan politik, dengan adanya pendidikan politik maka masyarakat lokal akan terhindar dari usaha memilih calon yang tidak berkompeten.³

Menduduki sebuah jabatan itu tidaklah mudah, karena sesungguhnya jabatan adalah amanah yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia yang harus dipertanggung jawabkan diakhir kelak, seperti hadis rasulullah berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ
قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ

إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

²Leo Agustino, *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. (Bandung : Alfabeta, Juni 2014), hal. 209.

³Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. (Makassar : Alauddin University Press , 2012), hal. 120.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin 'Amru dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Ibnu Hujairah Al Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar."⁴

Hadis diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya jabatan itu bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting sehingga jabatan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, akan tetapi kita harus memahami jabatan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, maka dari itu janganlah engkau terlalu memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan suatu jabatan karena pada akhirnya jabatan yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban diakhir masa nanti. Oleh sebab itu janganlah engkau mengejar suatu jabatan bila akhirnya engkau tidak mampu mempertanggung jawabkan jabatan tersebut sebab jabatan adalah amanah dari Allah swt. yang harus dilaksanakan dengan baik.

Sebelumnya berkenaan dengan fungsi politik klan yang harus digunakan dengan semestinya sesuai dengan perintah Allah swt. seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nahl : 90

⁴Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi "shahih Muslim bab tentang kepemimpinan" No. Hadis : 3404 tercantum dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Menyuruh kepada keadilan dan kebaikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia Melarang perbuatan keji, kemungkar, dan kezaliman. Dia Memberi pengajaran kepada kalian supaya kalian dapat mengambil pelajaran. sesungguhnya Allah Menyuruh kepada keadilan, yakni agar bertauhid dan kebaikan dengan jalan menunaikan segala kewajiban. Menurut satu pendapat, agar berbuat baik kepada orang lain serta memberi kepada kaum kerabat), yakni menyambungkan tali silaturahmi dengan mereka. dan Dia juga Melarang perbuatan keji yakni dari segala kemaksiatan, kemungkar, yakni hal-hal yang tidak diterangkan dalam syariat dan Sunnah, dan kezaliman yakni melampaui batas dan bertindak zalim. Dia Memberi pengajaran kepada kalian yakni Dia Melarang kalian dari perbuatan keji, kemungkar, dan kezaliman supaya kalian dapat mengambil pelajaran yakni supaya kalian dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan al-Quran.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ .

Artinya:

Dari Yazid bin Abi Sufyan dia berkata; Abu Bakar berkata ketika mengutusku ke Syam: Wahai Yazid sesungguhnya kamu memiliki kerabat, semoga kamu tidak mengedepankan mereka dalam kepemimpinan, dan hal itulah yang paling aku takutkan darimu, karena Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa memimpin suatu urusan kaum muslimin, kemudian mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan, maka baginya laknat dari Allah, dan Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan juga amal perbuatan nafilah darinya, sampai dia memasukkannya ke dalam neraka jahannam...

Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintahan. Susunan birokrasi pemerintah akan terdiri dari jabatan-jabatan yang diisi oleh para birokrat karier, dan ada pula yang diisi oleh para pejabat politik. Kehadiran pejabat politik yang berasal dari kekuatan politik atau partai politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu,

penataan birokrasi pemerintah dengan mengakomodasikan hadirnya jabatan-jabatan dan para pejabat politik perlu di tata dengan baik.⁵

Tahun politik, begitulah istilah yang seringkali disebut untuk menggambarkan pesta demokrasi Indonesia ketika memasuki tahun periodenya. Tahun ini adalah babak awal dan akhir dari petualangan para aktor politik; babak awal bagi mereka yang terpilih melalui proses prosedural demokrasi, dan akhir bagi yang tak terpilih atau setidaknya ia harus menunggu masa lima tahun mendatang.

Namun diantara mereka yang terpilih, tidak sedikit yang sesungguhnya hanyalah melanjutkan kekuasaan masa lalunya atau bahkan melanjutkan “darah kekuasaan” dari generasi sebelumnya. Sejatinya, tahun ini juga menjadi harapan akan adanya sirkulasi aktor politik dalam mekanisme demokrasi prosedural. Meskipun demikian, nyatanya realita politik malah menciptakan sebuah siklus kekuasaan yang langgeng. Sehingga para penulis politik kemudian mencoba menyimpulkan bahwa demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia telah membuka peluang bagi perubahan dinamika politik lokal diberbagai daerah.⁶

Dinamika politik menunjukkan bahwa, para aktor politik ditingkat lokal menjalankan mobilisasi politik berdasarkan identitas (klan,suku,agama dan bahasa) dan jaringan (birokrat dan pengusaha), dengan hasil yang menunjukkan bahwa

⁵Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. (Yogyakarta : Matapena Institute Empower,Research and Development, September 2012), hal. 47.

⁶Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. (Yogyakarta : Polgom , 2014), hal. 1-2.

kandidat dengan jejaring personal (*personal network*) terkuatlah yang akan memenangkan pemilihan. Fenomena munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi tekanan politik sentralisasi pada masa Soeharto dan tekanan politik desentralisasi pasca Soeharto. Meskipun di awal pelebagaan desentralisasi pola ini belum terlihat, akan tetapi memasuki dekade kedua pasca-reformasi, kecenderungan pada semakin oligarkisnya kekuasaan politik lokal semakin terlihat nyata. Mengenal hal ini, berbagai studi telah dilakukan dan seluruh kesimpulannya mengacu pada satu tesis: bahwa transisi konstitusional ini bukanlah demokrasi .

Meskipun sejarah sudah menjelaskan tindakan tiga kelompok kaum intelektual Indonesia pada masa akhir 20-an, yang menjadi lebih menarik untuk tulisan ini adalah pandangan mereka terhadap prinsip demokrasi politik lokal dan otonomi. Pandangan tersebut akan memberikan suatu penjelasan mengenai visi kaum mahasiswa dan intelektual lain yang kemudian akan menjadi pemimpin Negara Indonesia pada masa kemudian.⁷ Demokrasi lokal menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam kancah politik, dalam hal ini kemungkinan untuk dipilih menjadi wakil rakyat atau menduduki suatu jabatan politik.

⁷Jamil Gunawan dan kawan-kawan, *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2005), hal. 7.

Hadirnya klan Andi Masdar Pasmal sebagai elit politik merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas, mereka berasal dari golongan bangsawan, pejabat, ataupun mereka yang memiliki basis ekonomi yang kuat (pengusaha). Maka, dari sinilah pertanyaan-pertanyaannya akademis lahir. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar utama untuk menjelaskan kekuatan keluarga yang memperoleh kekuasaan dalam politik lokal, menguraikan perkembangan karakteristik terbaru dalam politik lokal di Indonesia terkait dengan reproduksi kekuasaan dan sebagai perspektif baru dalam melihat demokrasi dan masa depannya di Indonesia.⁸

Pelaksanaan demokrasi lokal melalui otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) ruang lingkup interaksi yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka studi ini memberikan perhatian pada proses pembentukan klan politik pada tingkat lokal melalui mekanisme demokrasi. Proses ini menggunakan mekanisme demokrasi sebagai pilihan terhadap banyak kalangan termasuk keluarga Andi Masdar Pasmal. Oleh sebab itu, studi ini memberikan fokus perhatian pada pembentukan klan Andi Masdar Pasmal.

⁸Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. (Yogyakarta : Polgom, 2014), hal. 2-6

⁹Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 113-114.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas maka dibuatlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmard di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Faktor- faktor apa yang mendasari sehingga keluarga Andi Masdar Pasmard masih terlibat/eksis diranah politik sampai saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Terjadinya sebuah kejadian klanisasi dalam ranah pemerintahan, baik ditingkat daerah maupun pusat terutama yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, menjadi suatu keinginan peneliti untuk meneliti dan mengkajinya dengan berpatokan pada sebuah tujuan antara lain:

Studi ini bertujuan untuk melacak pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmard di Kabupaten Polewali Mandar. dan melacak sumber daya yang dimiliki klan Andi Masdar Pasmard sebagai salah satu faktor dalam mempertahankan pengaruhnya terhadap masyarakat di Polewali Mandar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan studi mengenai salah satu elit politik lokal di Polewali Mandar dan Sulawesi Barat pada umumnya.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan tentang klanisasi politik Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari Politik Klan Andi Masdar Pasmawati di Kabupaten Polewali Mandar.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai untuk :

Menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai Klanisasi Demokrasi Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari politik klan Andi Masdar Pasmawati di Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga dapat berguna untuk memberikan informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya.

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar berguna bagi:

1. Penulis, agar dapat menambah sumber pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan baik dilingkungan kampus maupun didalam

perkuliahan, selain itu hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Masyarakat khususnya masyarakat yang ada diseluruh di Kabupaten Polewali Mandar, agar dapat mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang klanisasi politik Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari politik Klan Andi Masdar Pasmard di Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun manfaat ilmiah penelitian :

1. Kegiatan serta hasil penelitian ini dijadikan sebagai alat pembuktian terhadap klanisasi seorang pemimpin dalam konsep kekuasaannya.
2. Berguna bagi kalangan yang memiliki kewenangan dalam dunia politik sehingga mereka terdorong untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi didalam lingkungan politik.
3. Berdasarkan tercapainya beberapa tujuan dari penelitian ini, diharapkan bisa berguna bagi seluruh pihak khususnya aktor politisi dan masyarakat agar dapat memahami apa itu klanisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, beberapa karya yang berkaitan dengan tema tersebut.

1. Husman Husain dalam skripsinya: Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo periode 2008-2013 di Kabupaten Bone, dimana penelitiannya

hanya berfokus pada pengaruh politik dinasti Andi Idris Galigo di Kabupaten Bone serta implikasinya bagi proses demokrasi Indonesia. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa politik dinasti sebenarnya mempunyai dampak positif yaitu sebagai penguatan ideologis partai politik. Akan tetapi juga memiliki dampak negatif seperti dalam sistem politik dinasti yang dicontohkan oleh Kabupaten Bone justru sebaliknya tidak mengacu pada sistem demokrasi esensial. Artinya bahwa aktor yang akan muncul dalam demokrasi ini berputar disekitar itu saja, dan sangat bisa ditegaskan dalam pengamatan ini bahwa politik kekerabatan telah keluar dari substansial demokrasi itu sendiri.¹⁰

2. Hasil Penelitian Wasisto Raharjo Djati dalam bentuk jurnal yang berjudul “Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam

¹⁰Skripsi Husman Husain mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. *Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo periode 2008-2013 di Kabupaten Bone. Di Kutip Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2015. Pukul 13.30.*

menganalisis dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia.¹¹

3. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang di muat dalam Media Tribun Timur Makassar, tentang Politik Dinasti Syahrul Yasin Limpo di Makassar menyatakan bahwa dinasti politik yang sedang berkembang di Sulsel lambat laun akan meruntuhkan sebuah peradaban. Kekuasaan yang berdasarkan keluarga dan kerabat itu tak memberi peluang bagi orang lain untuk mendapatkan persamaan hak dalam politik dan pemerintahan. Dinasti boleh dibangun tapi dinasti simbolis, bukan kekuasaan pemerintahan. Sejarahwan LIPI, Anhar Gonggong menilai dinasti politik dan politik dinasti di Sulsel yang sedang dibangun klan Yasin Limpo tak dapat dilarang kendati sisi negatif lebih mendominasi. Dinasti politik hadir karena tak bisa dilepas dari pilihan rakyat. Klan Yasin Limpo hadir di pemerintahan karena pilihan rakyat. “Sebaiknya harus ada etikanya juga. misalnya jangan yang memimpin hanya dari mereka saja terus. Ada ruang tertentu di mana orang lain juga masuk. Saya tidak mau terlalu

¹¹ Wasisto Raharju Djati. Dalam jurnal sosiologi masyarakat yang berjudul *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal*. Vol. 18, No. 2, Juli 2013:203-231. Dipublikasikan oleh: Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI. Diakses Hari/Tanggal: Selasa, 7 April 2015. Pukul: 11.07.16 AM.

menyebut bahwa sudah sangat dominan peran klan SYL (Syahrul Yasin Limpo) di Sulsel tetapi secara kenyataan memang dinasti SYL itu sudah terbangun di Sulsel,” ujar Anhar menjelaskan. Jika klan ini mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan, tak masalah. Namun, kata Anhar, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga dan tak memiliki kompetensi, merupakan kesalahan besar. Dinasti politik tak hanya hadir di Sulsel. Ada juga di Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan provinsi lain di Indonesia. Di beberapa negara juga hadir, seperti di Pakistan, negara komunis seperti di Korea Utara.¹²

4. Jurnal Dadi Junaedi Iskandar yang berjudul “ *Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi*. Yang menyimpulkan bahwa musuh pertama Republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahan raja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi, kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal; sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada dibawah

¹² Jurnal Universitas Indonesia oleh Wasisto Raharjo Djati . *Peneliti Politik LIPI: Peradaban di Sulsel Diruntuhkan Dinasti*. Selasa, 17 September 2013 09:01. Dalam situs : <http://makassar.tribunnews.com/2013/09/17/peneliti-politik-lipi-peradaban-di-sulsel-diruntuhkan-dinasti> akses selas 7 april 2015.Pukul 11.21.

kontrol masyarakat, sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris, termasuk dalam proses politik dan penyelenggaraan suatu pemilihan umum atau pilkada. Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penanda kedaulatan rakyat, dimana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilu merupakan suatu kesempatan member dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinan local benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.¹³

5. Jurnal Masda Putri Amelia yang berjudul “ *membangun dinasti politik melalui penguatan jejaring kekuasaan pada walikota probolinggo*”. Yang menyimpulkan bahwa dinasti politik banyak dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Dinasti politik merupakan kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah politik pendahulunya dengan cara penunjukan anak, istri, paman, dan semacamnya untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai (lembaga) politik. Biasanya ini adalah cara agar sanak famili tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik baik sebagai bupati/wakil bupati (eksekutif) maupun sebagai anggota perwakilan rakyat/DPRD. Hal ini dapat menghambat

¹³ Jurnal Dadi Junaedi Iskandar yang berjudul “ *Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi*. Dalam situs <http://www.e-jurnal.com/2016/02/demokrasi-otonomi-dan-fenomena-politik.html>. diakses Hari/Tanggal: Senin, 18 April 2016. Pukul 18.04.

sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Dinasti politik di daerah dapat dilihat dari hubungan antara aktor-aktor dalam struktur politik, yang mana terdapat hubungan keluarga diantara mereka. Substruktur yaitu walikota sebagai lembaga eksekutif yang juga didukung oleh suami beserta putranya dengan menduduki jabatan-jabatan dalam infrastruktur. Beberapa teman dekat walikota juga menduduki posisi-posisi dalam infrastruktur yaitu sebagai kelompok kepentingan, dalam hal ini sebagai elite ekonomi dan elite agama. Keluarga beserta teman dekat walikota memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga kedudukan dari para elite tersebut sangat terlihat dalam masyarakat. Hubungan walikota dengan keluarga dan teman dekatnya merupakan jejaring yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian maka dapat membantu walikota dalam membangun dinasti politik. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan metode kualitatif.¹⁴

Sesuai dengan beberapa contoh penelitian yang diutarakan diatas maka, penulis melakukan penelitian dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan beberapa contoh yang ada di atas. Penulis melakukan penelitian dengan judul

¹⁴ Jurnal Masda Putri Amelia yang berjudul “ *membangun dinasti politik melalui penguatan jejaring kekuasaan pada walikota probolinggo*”. Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.3 Agustus-Desember 2015, 319-327., Dalam situs: www.journal.unair.ac.id>.. Diakses Hari/Tanggal: Senin, 18 April 2016. Pukul 17.25.

Klanisasi Politik di Kabupaten Polewali Mandar studi kasus Politik Klan Andi Masdar Pasmal di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun perbedaan hasil penelitian penulis dengan beberapa contoh diatas adalah pada penelitian ini peneliti lebih mengkaji bagaimana sebuah klanisasi politik itu bisa hadir, faktor apa yang menyebabkan sehingga politik klan itu bisa hadir dan bagaimana politik klan bisa mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada. Sehingga keistimewaan dari hasil penelitian ini adalah menjawab secara lengkap tentang masalah mengenai politik klan atau politik keluarga/politik kekeluargaan.

F. Kerangka teori

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmal di Kabupaten Polewali Mandar dan faktor- faktor apa yang mendasari sehingga keluarga Andi Masdar Pasmal masih terlibat/eksis di ranah politik sampai saat ini yaitu teori elit, teori kekuasaan, teori sistem kekerabatan dan teori modal.

a. Teori Elit

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam

lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama: elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Kedua, lapisan rendah kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik.

Teori elit ini digunakan peneliti lapangan untuk menganalisis tentang masalah bagaimana keluarga Andi Masdar Pasmur memfungsikan posisinya sebagai elit politik di Polewali Mandar

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam dari pada elit tradisional.¹⁵

Sesuai pendapat Pareto yang membagi elit menjadi dua kelas, keluarga Andi Masdar Pasmur termasuk salah satu golongan kelas elit yang diutarakan Pareto tersebut, yang dimana keluarga Andi Masdar Pasmur ini merupakan golongan kelas elit yang memerintah.

¹⁵ Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hal 12.

b. Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan ini digunakan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis mengenai kekuasaan Keluarga Andi Masdar Pasmari di Kabupaten Polewali Mandar diranah politik, salah satunya adalah bagaimana Andi Masdar Pasmari ini mentransferkan kekuasaannya kepada regenerasinya terutama dalam berinteraksi kepada kalangan masyarakat.

Kekuasaan politik dalam pandangan Aristoteles juga merupakan bentuk kekuasaan yang tepat bagi seorang suami terhadap istrinya-asalkan sang suami dapat menempatkan diri dengan tetap sebagai penguasa. Kekuasaan itu politis karena perempuan memiliki kapasitas deliberatif yang sama dengan laki-laki, tetapi suamilah yang bertanggung jawab secara tetap dikarenakan akal seorang perempuan, menurut pandangan Aristoteles, akuror 'tidak memiliki kecakapan khusus'. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang konsep kekuasaan politik Aristoteles, juga tentang pandangannya terhadap perempuan. Bagaimana mungkin kekuasaan menjadi politis bila seseorang selama-lamanya diperintah oleh orang lain? Dan dalam menjustifikasi kekuasaan tetap suami atas istri tersebut, apa maksud Aristoteles ketika mengatakan akal perempuan 'tidak memiliki kecakapan khusus'? tidak memiliki kecakapan khusus atas apa-emosinya (interpretasi intrapersonal) ataukah atas laki-laki

(interpretasi interpersonal)? (tidak heran, ada literatur yang sangat tebal mengenai uraian Aristoteles tentang perempuan).¹⁶

Asumsi yang digunakan oleh Thomas Hobbes untuk membangun konsepsinya tentang kekuasaan adalah bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki hakikat sosial. Secara alamiah, manusia adalah makhluk yang secara terus menerus selalu ingin berusaha memenuhi segala hasrat dan keinginannya. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan setiap individu adalah ancaman bagi individu lainnya. Sehingga mau tidak mau manusia mesti bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lain: *homo homini lupus*. Keadaan itulah yang kemudian memaksa individu-individu itu mengambil tindakan bersama. Mereka mengadakan perjanjian diantara mereka sendiri, artinya saling memberi janji untuk mendirikan satu lembaga dengan wewenang mutlak untuk menata mereka melalui undang-undang dan untuk memaksa semua orang agar taat terhadap undang-undang itu. Mereka menyerahkan semua hak alamiah mereka kepada lembaga itu, kecuali tentu hak untuk melindungi diri. Karena hak itulah yang mendasarkan kerelaan mereka untuk tunduk terhadap lembaga itu. Dan dari sinilah kemudian muncul kekuasaan negara.

c. Teori Sistem Kekerabatan

Menurut David Scheneider baginya teori kinship/ sistem kekerabatan yang berdasar pada genealogis/ hubungan darah, garis keturunan, dan hubungan keluarga

¹⁶ GERAL F. GAUS DAN CHANDRAN KUKATHAS, *Handbook Teori Politik*. (Bandung : Nusa Media, 2013), hal 715.

merupakan ilusi etnosentrik yang dibangun oleh orang-orang Eropa dan Amerika Utara secara budaya. Merupakan suatu proyeksi obsesi kultural mereka, karena seperti konsep keluarga ayah, ibu dan anak tidak bersifat universal sehingga ia menggunakan konsep kekerabatan ini sebagai konsep dekontruksi terutama tentang teori sistem kekerabatan. Misalnya seperti ia katakan, konsep keluarga tidak mesti harus bapak, ibu dan anak seperti yang kita ketahui.

Di teori sistem kekerabatan ini peneliti menggunakannya sebagai dasar analisis untuk meneliti di lapangan mengenai terjadinya politik klan di keluarga Andi Masdar Pasmard dengan melihat bagaimana sistem kekerabatan yang mereka gunakan itu bisa kuat, sehingga eksistensi politik keluarga/kekerabatan mereka masih bertahan sampai saat ini.

Kenyataannya dalam suku-suku atau peradaban tertentu, konsep keluarga bisa jadi hanya ibu dan anak, atau yang lain. Bukan fungsi bapak dan ibu tetapi simbol-simbol orang tua atau bapak ibu yang ada dalam anggota keluarga ini atau ke orang lain yang bisa jadi tidak sedarah. Baginya sistem kekerabatan atau keluarga di Amerika adalah suatu sistem simbol budaya. Jadi tiap kebudayaan punya sistem kekerabatan yang berbeda, tidak mesti sama harus hubungan sedarah.

Tapi itulah menariknya kajian kekerabatan ini. Tapi jangan salah dari kekerabatan ini muncul politik kekerabatan. Sesuai analisa James Scott tentang patron klan, relasi hubungan kekuatan antar individu, dasarnya adalah hubungan

kekerabatan. Primordial juga selain hubungan kesukuan, juga mensyaratkan hubungan kekerabatan yang kuat.

d. Teori Modal

Ditulis ini penulis menggunakan teori modal yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu yang menunjukkan bahwa teori modal itu terdiri atas modal sosial, modal politik, modal ekonomi dan modal simbolik. Diteori modal ini peneliti menggunakannya untuk menganalisis mengenai apa yang menjadi faktor penentu keluarga Andi Masdar Pasmard tetap bertahan di ranah politik sampai saat ini.

1. Modal Sosial

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua kelompok. Pertama : menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua : lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Modal sosial menurut Pierre Bourdieu, mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”.

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital*

(modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Jadi, inti dari modalitas sosial yatu: (1) adanya kepercayaan dari masyarakat, (2) adanya interaksi sosial dan (3) adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

2. Modal Politik

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan dalam pemilu.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A. Hick dan J.Mirsa mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, Modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bias dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kementasianya dalam proses politik seperti pemilihan umum. Jadi, modal politik yaitu: (1) kepemilikan jabatan politisi, (2) Adanya dukungan dari parpol tertentu dan (3) Adanya tim sukses yang solid.

3. Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

Jadi modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumber daya dari dana pribadi dan donator, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk kemenangan pemilihan umum. (Adanya dukungan dana dan adanya kepemilikan alat produksi atau perusahaan).

4. Modal Simbolik

Menurut Pierre Bourdieu, pada dasarnya, modal simbolik (seperti prestise, kehormatan atau charisma). ialah modal lainnya ketika diketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan simbolis yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal simbolik merupakan hasil

transformasi dari modal ekonomi, sosial dan cultural ke dalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan besar.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Waktu dan lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan (Januari-Februari) tahun 2016 , dan tempat lokasi penelitian berada di Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan Wonomulyo dan Polewali) Provinsi Sulawesi Barat.

2. Jenis penelitian

Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penelitian kualitatif deskriptif dibagi dalam dua hal. pertama, penelitian kualitatif deskriptif “unmeaning” hanya untuk memaparkan bagian permukaan dari sebuah realitas empiris. Kedua, penelitian kualitatif deskriptif “*meaningfull*” yakni penelitian deskriptif yang selain mengungkap permukaan luar dari sebuah realitas sosial, tapi juga hingga bagian dalam.¹⁸

¹⁷Haryanto, *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. (Yogyakarta Polgom, 2014), hal.17

¹⁸Mukhtar , *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. (Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group), february 2013), hal. 29-30.

3. Subyek dan Obyek Penelitian.

a. Subyek penelitian

Subyek yang akan diteliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah anggota keluarga bapak Andi Masdar Pasmal.

b. Obyek penelitian

Obyek dari pelaksanaan penelitian ini adalah klanisasi politik Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari Politik Klan Andi Masdar Pasmal di Kabupaten Polewali Mandar).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menggunakan dua tehnik pengumpulan data, yaitu :

a. Teknik *Library Research*.

Library Research, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku dan literature ilmiah yng berhubungan dengan masalah yang di teliti.

b. Teknik *field reserch*.

field reserch : Melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan data dalam penelitian yang dibahas. Hal ini menggunakan teknik sebagai beriku:

Wawancara : peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di antaranya yaitu :

- Anggota keluarga bapak Andi Masdar Pasmal yakni Bapak Andi Ibrahim Masdar

- Beberapa masyarakat :

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1.	Jamaluddin	Tokoh Agama/Guru Honorir	38 tahun
2.	H.Sarja	Staf Ahli Politik dan hukum bupati/ PNS	56 tahun
3.	Ibrahim arif	Wiraswasta	34 tahun
4.	Muh. Yakub	Guru	47 tahun
5.	H. Baharuddin yusuf	Wiraswasta	55 tahun
6.	Muh.Syahid	Akademisi/Mahasiswa	21 tahun

Teknik wawancara yang digunakan yaitu:

- Wawancara tatap muka disebut juga dengan wawancara personal, dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja atau tempat tinggal informan.

Tipe wawancara tatap muka yang diambil adalah wawancara tatap muka terstruktur artinya suatu pertanyaan baku (standar) telah disiapkan sebelumnya dan

pewawancara tidak banyak kebebasan dalam mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.¹⁹

b. Studi Dokumentasi dan Literatur

Untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang lebih banyak dan sebelum dielaborasi, peneliti melakukan studi dokumentasi dan literatur agar penelitian ini dapat disajikan lebih akurat. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda dan sebagainya. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis yang ada baik berupa buku, profil, peraturan, literatur, laporan maupun tabel yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan studi pendokumentasian dan literatur berupa data-data hasil penelitian atau riset terdahulu yang relevan dengan kajian ini, literatur yang mendukung, jurnal-jurnal ilmiah, data media massa yaitu koran, majalah, atau internet, data-data resmi kelembagaan, maupun data pendukung lainnya.

5. Sumber Data

Data yang didapatkan bersumber dari :

¹⁹Morissa, (Andy Corry W.dan Farid Hamid U. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 223.

Data Primer : Data yang didapatkan tanggapan dan jawaban dari informan untuk pertanyaan yang diberikan mengenai tema yang sedang diteliti.

Data Sekunder : Data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan meneliti bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini berlangsung bertahap yakni pengkajian literature atau pengamatan pada fenomena, kategorisasi, menelusuri kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, menarik kesimpulan, serta membangun teori.²⁰

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

²⁰ Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 144.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SILSILAH KELUARGA ANDI MASDAR PASMAR

Di bagian ini penulis membahas tentang profil Kabupaten Polewali Mandar, yaitu meliputi lokasi geografi, iklim, politik dan pemerintahan, sosial, agama dan kependudukan/masyarakat Polewali Mandar. Dibab ini juga menguraikan tentang silsilah keluarga Andi Masdar Pasmar, dimulai dari nenek moyang mereka sampai kepada anak dan cucunya.

A. Profil Kabupaten Polewali Mandar

Bertolak dari semangat “*Allamungan Batu di Luyo*” yang mengikat Mandar dalam perserikatan “*Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*” dalam sebuah muktamar yang melahirkan “Sipamandar”(saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Raufmencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).²¹

²¹ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar.www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab.Polmas.²²

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi. Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi

²² Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar. www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju.

Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa). Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting: Jaraknya yang cukup jauh dari ibukota propinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnis kecil lainnya seperti Bugis, Jawa dan kelompok etnis lainnya) .²³

Awal Tahun 1960-an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ikon nasional gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan risalah demokrasi menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama tentara pembelot (Batalion 710 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan hutan untuk

²³ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar. www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya.

Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan-permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu. Konteks Kabupaten Polewali Mandar, sebelum daerah ini bernama Polewali Mandar, daerah ini dulunya bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 yang secara administratif pada saat itu berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan . Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.²⁴

Masa penjajahan wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu:

²⁴ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar. www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

1. Onder Afdeling Majene beribukota Majene;
2. Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju;
3. Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali;
4. Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa.

Onder Afdeling Majene, Mamuju, dan Polewali yang terletak di sepanjang garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) meliputi:

1. Balanipa di Onder Afdeling Polewali
2. Binuang di Onder Afdeling Polewali
3. Sendana di Onder Afdeling Majene
4. Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene
5. Pamboang di Onder Afdeling Majene
6. Mamuju di Onder Afdeling Mamuju
7. Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.²⁵

Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa, yang meliputi:

1. Tabulahan (Petoe Sakku)
2. Aralle (Indo Kada Nene)

²⁵ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar. www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

3. Mambi (Tomakaka)
4. Bambang (Subuan Adat)
5. Rantebulahan (Tometaken)
6. Matangnga (Benteng)
7. Tabang (Bumbunan Ada)

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu diantara 5 (lima) Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat sendiri adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II, yang dimekarkan berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 yaitu:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraj Pamboang, dan Swapraja Cenrana (sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, yang meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali dan Onder Afdeling Mamasa.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah provinsi, dua diantara

²⁶ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar. www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

Kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua Kabupaten terpisah: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Adapun VISI dan MISI Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

a. Visi

Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Polewali Mandar Bernafaskan Ajaran Agama dan Nilai-nilai Budaya Sipamandar.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Polewali Mandar menuju kondisi yang diharapkan, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam berintegrasi dengan tatanan kehidupan global.
- Melaksanakan agenda reformasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Penegakan supremasi hukum dan HAM untuk tumbuh dan berkembang kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana serta memaksimalkan sektor-sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

- Meningkatkan SDM dan pemberdayaan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada kemandirian local.
- Mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap bentuk kemitraan pembangunan serta menciptakan iklim yang kondusif untuk memacu kehidupan perekonomian daerah.
- Mengembangkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah agropolitan dalam mengantisipasi pasar global.²⁷

Konteks Kabupaten Polewali Mamasa, sejarah pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari peran panitia penuntut kabupaten. Dalam catatan sejarah terdapat beberapa versi tentang komposisi personalia Panitia Penuntut Kabupaten Polewali Mamasa. Namun dalam penulisan ini tim penyusun merujuk pada dua sumber referensi yaitu panitia penuntut kabupaten versi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 tentang Inventarisasi Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Polmas 1918-1983 dan versi naskah sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa yang ditulis dan dibacakan oleh H.Ibrahim Puang Limboro pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Polewali Mamasa ke 23 tanggal 21 februari 1983.

Buku Inventarisasi Arsip Pemerintah Daerah Polmas yang diterbitkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa

²⁷ Data resmi dari website Kabupaten Polewali Mandar.www.polmankab.go.id > selayang-pandang-polewali-mandar-2 April /2013, diases Hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10.52.

sejarah pembentukan Kabupaten Polewali Mamasa 1960 diawali diawali dengan pembentukan tim/panitia penuntut pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa yang susunan personalianya terdiri atas :

Ketua : Andi Magga
Wakil Ketu : Tamadjoe
Sekretaris : Gama Musa
Anggota : H. Ibrahim Puang Limboro, H.A.Paliwang,
A.Pallalungang, Frans Palupadang, H.Muhsin
Tahin, J.Mboe Barapadang, SultaniDg.Panampo

Sementara dalam naskah sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa yang ditulis dan dibacakan oleh H.Ibrahim Puang Limboro pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Polewali Mamasa ke 23 tanggal 21 Februari 1983 dijelaskan bahwa pada tanggal 20 Maret 1957 diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh pemuka pemuka masyarakat dari semua golongan. Pertemuan tersebut ditetapkan komposisi dan personalia Panitia Penuntut Kabupaten sebagai berikut :

1. Ketua : H.A.Paliwangi
2. Wakil Ketua I : H.Ibrahim Puang Limboro\
3. Wakil Ketua II : Tamadju
4. Sekretaris I : A.Palulungan
5. Sekretaris II : Abd.Mutalib
6. Bendahara : Sultani Daeng Manompo

7. Pembantu : Juliani Naharuddin, A.A.Hafid Mattalattu
Aco Dg.Cora, Paloncong Pabbicara Bulan,
Abdul Jabbar, Abdullah AK, Suahabuddin.S.

Selanjutnya dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa tugas utama dari Panitia Penuntut Kabupaten yang telah dibentuk adalah menyusun rencana strategis dalam bentuk konsep dan aksi yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk menyatukan Onderfdeling Polewali dan Onder Afdeling Mamasa menjadi satu Kabupaten. Ada beberapa ide yang berkembang dalam pemberian nama Kabupaten tersebut. Sebagian tokoh masyarakat menghendaki nama Kabupaten yang akan dibentuk diberi nama Kabupaten Balanipa berdasarkan tinjauan historisnya. Disisi lain ada juga yang menghendaki nama Kabupaten yang akan dibentuk menjadi Kabupaten Maspol singkatan dari nama Mamasa Polewali. Namun setelah Panitia Penuntut Kabupaten melaksanakan musyawarah secara mufakat maka ditetapkanlah nama Kabupaten Polewali Mamasa sebagai nama Kabupaten yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat dengan Ibu kotanya Wonomulyo.

Tidak dapat disangkal bahwa upaya yang dilakukan Panitia Penuntut Kabupaten dalam memperjuangkan berdirinya Kabupaten Polewali Mamasa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi politik Afdeling Mandar saat itu. Salah satu hambatan mendasar adalah adanya kelompok atau pihak pihak tertentu yang dengan sengaja mencoba menghalang halangi kegiatan panitia ini. Ada secara sembunyi-sembunyi melakukan provokasi untuk menghalangi pembentukan Kabupaten

Polewali Mamasa dan ada pula kelompok yang secara langsung membuat resolusi ke pemerintah pusat yang semuanya sangat merugikan strategi perjuangan.

Mengenai adanya beberapa tantangan ini, Panitia Penuntut Kabupaten melakukan gerak cepat membentuk delegasi yang berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Delelegasi ini terdiri dari Lima orang yaitu :

1. J.Leboe Barapadang mewakili unsur Pemerintah
2. Sultani Dg.Manompo mewakili unsur Cendikiawan
3. K.H.Muksin Tahir, unsur tokoh masyarakat
4. Gama Musa, unsur tokoh masyarakat
5. Frans Palopadang, unsur tokoh masarakat

Delegasi ini berjuang ditingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pembentukan Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dibantu oleh salah seorang anggota DPRGR/MPRS asal daerah Polewali Mamasa, H.Syarifuddin. Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 ditetapkan oleh Sidang Pleno DPRGR Pusat dan terbentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa bersama Daerah Tingkat II lainnya di Sulawesi dengan ibukota Polewali. Pemindahan rencana ibukota dari Wonomulyo ke Polewali didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya pertimbangan sosial, ekonomi dan politik.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 diadakanlah pembenahan berupa pengaturan dan penyempurnaan aparat kelengkapan pemerintahan pada masing masing Daerah Tingkat II. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, pemerintah menunjuk dan melantik Andi Hasan Mangga sebagai Bupati pertama Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 20 Februari 1960 sekaligus serah terima jabatan dari, Mattotorang Dg.Massikki selaku eks.Residen Afdeling Mandar.

Memasuki usia yang ke 51 Kabupaten Polewali Mandar telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan baik dalam jajaran eksekutif maupun legislatif diantaranya :

A. Eksekutif

1. H.Andi Hasan Mangga (1960-1966)
2. Letkol H.Abdullah Madjid (1966-1979)
3. Drs. A.Samad Syuaib (Pjs) (1979-1980)
4. Kol.(Purn) S. Mengga (1980-1990)
5. Drs.H.Andi Kube Dauda (1990-1995)
6. Drs.H.Tajuddin Noer (Pjs) (1995-1996)
7. Kol.H.A.Saad Pasilong (1995-1998)
8. Kol.H.Hasyim Manggabarani,SH,MM (1998-2003)
9. Drs. H. Syahrul Syahrudin,MS (Pjs) (2003-2004)

10. Drs.Ali Baal Masdar,M.Si (2004-2008)
11. H.Mujirin M.Yamin, SE,MS (Pjs) (2008)
12. Drs.H.Ali Baal Masdar,M.Si (2008-2014)

B. Legislatif

13. Badjing Abd.Rahim
14. Muhiddin
15. H.Anwar Pabbicara Kenje
16. Muhiddin
17. H.A.Rahman Ali
18. J.M.Soerono
19. H.A.Saad Pasilong
20. H.Masdar Pasmarr
21. H.Bustamin Baddolo
22. H.Hasan Sulur
23. H.Abdullah Tato P

Terlepas dari berbagai versi tentang komposisi personalia panitia penuntut Kabupaten Polewali Mamasa, tim penyusun berupaya untuk tidak terjebak dalam kontroversi yang berkepanjangan. Sebaliknya tim penyusun senantiasa mencari informasi yang valid dari nara sumber yang memahami masalah ini dan mengkaji

dokumen yang berkaitan permasalahan ini, sehingga naskah yang tersusun dapat menjadi referensi untuk penulisan lebih lanjut sejarah pembentukan Kabupaten Polewali Mandar yang dapat diterima semua kalangan.²⁸

1. Keadaan Geografi dan Iklim

a. Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3°4,83''-3°32'3,79 lintang selatan dan 118°53'57,55-119°29'33,31'' bujur timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara, selat Makassar di sebelah selatan, Kabupaten Majene di sebelah barat, dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah sebesar 2.022,30 km yang secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km atau 17,65 persen dari luas wilayah terkecil adalah kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km atau 1,06 persen.

²⁸ Data resmi profil Polewali Mandar: <http://www.polmankab.go.id/sejarah-polewali-mandar/>. Diakses pada hari Selasa, 26 Januari 2016, pukul 10:00.

b. Iklim

Selama tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 132 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.480,3 mm . jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei dengan jumlah hari hujan 17 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebanyak 242,6 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dengan hari hujan 4 hari dan curah hujan 20,6 mm.²⁹

2. Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi

Sampai tahun 2014, Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari atas 16 Kecamatan, 144 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan Campalagian dengan 18 desa / kelurahan. Sedangkan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu kecamatan Anreapi dengan 5 desa / kelurahan.

b. DPRD

DPRD Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas 45 anggota DPRD . Dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar , hanya 9 orang yang berjenis kelamin perempuan (20 persen dari total anggota DPRD). Proporsi anggota DPRD menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai berikut 53,33 persen yang

²⁹ Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014

berpendidikan S1, 28.89 persen yang berpendidikan SLTA 13,33 persen yang berpendidikan S2, 4.44 persen yang berpendidikan diploma I-III. Selama tahun 2014, DPRD menghasilkan 16 peraturan daerah dan 8 keputusan DPRD dan 7 keputusan pimpinan DPRD.³⁰

Tabel 1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	perempuan	jumlah	persen
SLTA/ MA/ SMK	10	3	13	28.89
Diploma I/II	1	-	1	2.22
Diploma III	-	1	1	2.22
S1/ Diploma IV	19	5	24	53.33
S2	6	-	6	13.33
S3	-	-	-	-
Jumlah/total	36	9	45	100.00

c. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Pemerintah Pusat masing – masing mencapai 6.416 orang dan 804 orang. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sekitar 53.68 persen PNS

³⁰ Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

Kabupaten Polewali Mandar adalah perempuan dan 46.32 persen adalah laki-laki. Proporsi PNS Kabupaten Polewali Mandar menurut jenjang pendidikan sebagai berikut 0.26 persen berpendidikan SD, 0.48 persen berpendidikan SMP, 14.82 persen berpendidikan SMA, 14.78 persen berpendidikan Diploma I-III, 61.56 persen berpendidikan SI dan 8.09 persen berpendidikan S2 dan S3.



Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.³¹

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
PNS Kabupaten Polewali Mandar dan PNS Pusat	2.972+447	3.444+357	3.419+3.801	-
Sampai dengan SD	16+3=19	1	20	0.26
SLTP/Sederajat	30+5=35	1	36	0.48
SLTA/Sederajat	545+100=645	406+58= 464	1.110	14.82
Diploma I/II/III	261+52= 313	687+24= 711	1.024	14.78
S1/Diploma IV	1.745+258=2.003	2.205+270=2.475	4.478	61.56
S2/S3	375+29= 404	144+4= 148	404+148=552	8.09
Jumlah/total	=3.419	=3.801	=7.220	100.00

d. Administrasi Pemerintahan

Terdapat 809 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diterbitkan selama tahun 2014, yang sebagian besar berada di Kecamatan Polewali (369 Izin). Jumlah penerbitan IMB menurun sebesar 6,58 persen jika dibandingkan tahun

³¹ Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

2013. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil telah menerbitkan 16.883 akta kelahiran selama tahun 2014. Jumlah tersebut menurun 52.23 persen dari tahun 2013.

3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

Data penduduk tahun 2014 yang disajikan adalah angka estimasi penduduk yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 adalah 417.472 jiwa yang terdiri atas 203.981 laki-laki dan 213.491 perempuan. Periode yang sama, diperkirakan terdapat sekitar 93.647 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sekitar 4-5 orang.³²

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	203.981 Jiwa
perempuan	213.491 Jiwa
Jumlah/total	417.472 Jiwa

³² Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

Kepadatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar mencapai 206 penduduk per km² pada Tahun 2014. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Polewali dengan kepadatan penduduk 2.229 penduduk per km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Polewali Mandar di bawah 100. Ini berarti jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sebagian besar Kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin di bawah 100. Kecamatan yang rasio jenis kelaminnya di atas 100 adalah Kecamatan Tapango, Kecamatan Anreapi dan Kecamatan Matangnga.

b. Ketenagakerjaan

Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar sejumlah 291.791 penduduk usia kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15+).

TPAK Polewali Mandar pada tahun 2014 sebesar 68,30 persen berarti telah mengalami peningkatan sebesar 2,75 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 65,37 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 sebesar 2,98 persen. Berdasarkan lapangan kerja, dari 193.339 penduduk yang bekerja sekitar 48,8 persen dari mereka bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor

lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor perdagangan (17,8 persen), dan jasa (15,27 persen).³³

4. Sosial

a. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Tahun 2014 ditingkat SMP, Terjadi peningkatan jumlah lulusan dibanding tahun 2013. Seperti halnya dengan tingkat SMP, lulusan tingkat SMA dan SMK mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5.36 persen dan 1.77 persen. Sebaliknya jika dibandingkan tahun 2013 jumlah lulusan SD mengalami penurunan sebesar 1.52 persen.

b. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka terjadi peningkatan kesejahteraan. Ketersediaan sarana kesehatan akan sangat menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 terdapat 2 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 20 puskesmas, 56 pusku, 97 poskades, dan 514 posyandu di Kabupaten Polewali Mandar.

³³ Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.

c. Agama

Jumlah tempat peribadatan seperti masjid, langgar, gereja Kristen dan gereja Khatolik di Kabupaten Polewali Mandar masing-masing sebanyak 750, 112, 48, dan 10 buah pada Tahun 2014,. Jumlah masyarakat beragama Islam 390.484, Protestan 17.505 dan Khatolik 4.052 di Kabupaten Polewali Mandar.³⁴

B. Silsilah Keluarga Andi Masdar Pasmars

Klan Keluarga Masdar yang merupakan keturunan dari Bupati Polewali Mandar yang kelima yakni Kol. H. Andi Saad Pasilong (1995-1998) yang juga telah menjabat sebagai bupati Polewali Mandar. Kol. H. Andi Saad Pasilong merupakan Saudara Kandung dari Hj. Andi Suriayani Pasilong, yang menikah dengan salah satu bangsawan yang ada di Mandar dan juga merupakan ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, sekaligus ketua umum Golkar pada masa itu. yakni H Masdar Pasmars, kemudian anak Sulung dari mereka yakni Ali Baal Masda, menjadi bupati Polewali Mandar selama dua periode yakni periode 2004-2009 dan periode 2009-2014.

Keluarga Masdar masih terhitung bangsawan dari kerajaan Tapango. Garis ibu, Ali Baal pun terhitung keturunan raja. Ditambah lagi, Andi Ruskati Radjab (Bau Atti), istri Ali Baal, adalah cucu Ma'radia Banggae Rammang Patta Lolo, raja terakhir dari kerajaan Banggae di Onder Afdeling Majene.

³⁴ *Sumber data resmi terbaru dari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014.*

Silsilah keluarga Masdar Pasmari ini bertolak dari *Mara'dia Tapango H.A.Paselleri* yang menjadi Mara'dia Tapango pada sekitar tahun 1916 yang bersamaan dengan masa pemerintahan Arajang Balanipa ke 50 *Laju Kanna Doro* bergelar *Tomate di Juddah*. Mara'dia Tapango *H.A.Paselleri* yang memiliki saudara masing-masing bernama: *Puang Panda*, *Puang Tanre*, *Puang Lampoko* dan *Puang Djalawali* (Mara'dia Mapilli), mereka semua adalah putra dari pasangan, *Madannari* (Mara'dia Nepo), yang kawin dengan *Taali Daenna Liburang* yang mempunyai saudara bernama *Liburang* dengan *Daenna Rumpu* dan *Rumpu* dan *Taali Daenna Liburang* ini adalah anak dari *Baso Dakka* yang kawin dengan orang Matangnga yaitu keturunan dari *Tomakaka Posiq* bergelar "*Sambolangiq*" dan *Baso Dakka* ini adalah anak dari *Pasangan Arung Dakka* dan *Base Laliko* dimana *ArungDakka* adalah cucu dari *Palantaro* dan *Basse Laliko* adalah cucu dari *Pallaliko*, sedangkan *Pallaliko* adalah bersaudara dengan *Palantaro* dan *Pamarica* Arajang Balanipa ke 39 dan ke 41.³⁵

Mara'dia Tobaine Tapango *Hj.A.Sitti Taratti* yang juga bergelar "*Puang Jaja*" sebagai permaisuri (*Arung Towaine*) dari *H.A.Paselleri* yang bersaudara dengan *Imariase* dan *Iraga Daenna Imariase* mereka itu adalah cucu dari Arajang Balanipa ke 45,47 dan 49, bernama *Mannawari Mara'dia Kecce* bergelar "*Tomelloli*" yang makamnya ada di desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman.

³⁵ H. Ahmad Asdy. *Sekilas Tentang Mara'dia Tapango "Dalam Rangka Pengukuhan Mara'dia Tapango Oleh Lembaga Adat Tapango"*. (Tapango/Polewali Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2004), hal. 37- 38.

Pasangan dari kedua Mara'dia Tapango ini hanya melahirkan seorang Putra Tunggal bernama *H.M.Darasa* yang pada perjalanan selanjutnya menjadi *Mara'dia Tapango* menggantikan kedudukan ayahandanya atas kehendak adat Tapango. Yang kemudian *H.M. Darasa* kawin dengan *Hj.Masyurah* anak dari pasangan *Andi Oddang Makkarumpa* dan *Hj.A.Syahariah* dan lahirlah putra semata wayang bernama *H.M.Masdar Pasmar* menggantikan kedudukan *H.M.Darasa* menjadi *Mara'dia Tapango Malolo*,(pada saat beliau almarhum jenazah beliau tidak dapat disemayamkan sebelum Mahkota Mara'dia Tapango dipindahkan ke pada seseorang yang ditunjuk oleh kaum adat dan pada saat itu kaum adat melakukan sidang darurat dan sepakat menunjuk *Drs. Muhammad Ali Baal Masdar Pasmar M.si*, selaku penggantinya).³⁶

DR (HC) H.M.Masdar Pasmar sebelum menjabat sebagai *Mara'dia Tapango* terlebih dahulu kawin dengan *Hj.Andi Syuriani (Attana Ali)* yang juga disebut *Puang Suri* putri dari *Paqbicara Kaiyyang Balanipa Andi Pasilong* yang kawin dengan *Hj. Sitti Hadara* (*Puang Towaine*) dan memiliki anak sebanyak 5(lima) yaitu :

- Andi Pattayangi Pasilong: mantan Camat Campalagian.
- Hj.Andi Syuriani Pasilong : mantan anggota DPRD Kabupaten Polmas.
- Kolonel Andi Saad Pasilong : mantan Bupati Kabupaten Polmas.
- Hj. Andi Nuryani Pasilong MM : Camat Tinambung

³⁶ H. Ahmad Asdy. *Sekilas Tentang Mara'dia Tapango "Dalam Rangka Pengukuhan Mara'dia Tapango Oleh Lembaga Adat Tapango"*. (Tapango/Polewali Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2004), hal. 38- 39.

- Hj.Andi Hebawaty Pasilong : Istri dari mantan Wakil Bupati Kabupaten Majene.

Mereka semua ini adalah cucu dari Arajang Balanipa ke-50 *Laju Kanna Doro* yang populer dengan gelar “*Manuq Bulu Siruana Batulaya (Ayam jantan pilih tanding dari Batulaya)*” dan “*Manuq Sapparaya Tarrara’na Balanipa ditayi Taro’da Makkatoi DiTayi bassi Occongannami (Ayam jantan pemberani dari Balanipa yanag bersenjata bambupun tak jadi soal Apatalagi jika dengan senjata pusaka)*” dan Andi Pasilong selaku *Paqbicara KaiyyangBalanipa* adalah bersaudara sebanyak dua puluh empat diantaranya adalah *Andi Baso Pawiseang* Arajang Balanipa ke 51 suami dari *H.A.Depu* Arajang Balanipa ke 52 dari 24 bersaudara ini, mereka semua itu adalah anak dari *Pallabuang* yang bersaudara dengan *Passalunna* dan *Pakkarama* yang populer dengan gelar : “*Jakka Tallunna Balanipa*” Satria Tiga Perkasa Balanipa, ketiga satria ini adalah anak dari Arajang Balanipa ke 46 bernama *Itamanganro* alias *Ibaso Boroa* bergelar “*Tokape*”.³⁷

Hasil perkawinan antara DR.(HC) Masdar Pasmarsos dengan Hj.Syuriani ini maka lahirlah Mara’dia Malolo Tapango Drs.Muhammad Ali Baal Masdar Pasmarsos kemudian kawin dengan Dra. Hj.Andi Bau Ruskaty SE. putri dari Mara’dia Banggae Matoa yang selanjutnya dikaruniai 2 (dua) orang anak putra yang masing-masing bernama :

³⁷ H. Ahmad Asdy. *Sekilas Tentang Mara’dia Tapango “Dalam Rangka Pengukuhan Mara’dia Tapango Oleh Lembaga Adat Tapango”*. (Tapango/Polewali Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2004), hal. 39- 40.

1. Andi Iyan Rusli MP
2. Andi Ilham Rusali MP

Sabtu 19 juni 2004 dinobatkan menjadi Mara'dia Tapango dan Mara'dia Towaine Tapango definitif. Mara'dia Tapango Drs. Muhammad Ali Baal Masdar Pasmars. M.si yang menjadi Bupati terpilih Kabupaten Polewali Mamasa Masa Bakti 2004-2009. Akan tetapi karena kepercayaan masyarakat Polewali Mandar masih sangat kuat terhadap beliau maka beliau terpilih kembali menjadi Bupati Polewali Mandar dengan masa bakti 2009-2014. Bupati tersebut memiliki saudara kandung yang terdiri dari :

1. IR. Andi Ibrahim Masdar Pasmars yang kawin dengan Jumriah
2. Hj. Andi Nursyami Masdar Pasmars SE. yang dipersunting oleh Andi Mappauda
3. (Alm) Andi Baso Masdar Pasmars SE. yang kawin dengan IR. Nona Umiaty
4. Drs. Andi Irwan Masdar Pasmars yang kawin dengan Nurwaty. SE
5. (Almarhuma) Andi Kulfiaty Masdar Pasmars (meninggal pada tahun 1971).
6. H. Andi Masri Masdar Pasmars yang kawin dengan Kalsum Mokoginta.³⁸

³⁸H. Ahmad Asdy. *Sekilas Tentang Mara'dia Tapango "Dalam Rangka Pengukuhan Mara'dia Tapango Oleh Lembaga Adat Tapango"*. (Tapango/Polewali Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2004), hal. 40- 41.

Kesimpulan

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Kabupaten yang ada Di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar dulunya merupakan Polewali Mamasa. Secara astronomis, Kabupaten Polewali Mandar terletak antara $3^{\circ}4,83''$ - $3^{\circ}32'3,79$ lintang selatan dan $118^{\circ}53'57,55$ - $119^{\circ}29'33,31''$ bujur timur . Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara, selat Makassar di sebelah selatan, Kabupaten Majene di sebelah barat, dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur .

Keluarga Andi Masdar Pasmur merupakan keturunan bangsawan dimana jalur keturunannya berasal dari keturunan raja (Mara'dia) Tapango, jalurnya keturunan istrinya pun yang bernama Hj.Andi Syuriani (Attana Ali) juga berasal dari keturunan raja Balanipa dimana bapak dari Hj.Andi Syuriani (Attana Ali) yang juga disebut Puang Suri putri dari Paqbicara Kaiyyang (Juru bicara besar) Balanipa yang bernama Andi Pasilong.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Di bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang didapatkan dilapangan mengenai pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmard di Kabupaten Polewali Mandar melalui awal munculnya Andi Masdar Pasmard dan keluarganya (regenerasi) diranah politik. Dibagian ini akan diuraikan mengenai jalur politik yang dilalui keluarga Andi Masdar Pasmard diranah politik (jalur legislatif, partai/organisasi dan pilkada), kemudian dibab ini juga dibahas tentang faktor penentu klan Andi Masdar Pasmard melalui data beberapa informan, seperti faktor modal politik, modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolik.

A. Pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmard

Kasus di Polewali Mandar mengenai kemunculan elit politik lokal diawali dengan terbentuknya Daerah Tingkat II Polewali Mamasa berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dengan ibu kota Polewali. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1969, maka pemerintah menunjuk dan melantik Andi Hasan Mangga sebagai bupati pertama Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 20 Februari 1960 sekaligus serah terima jabatan dari Mattotorang Dg.Massiki selaku *eks* Residen *Afdeling* Mandar.Dilantiknya Andi Hasan Mangga sebagai bupati Polewali Mandar yang pertama (1960-1966), menandai lahirnya sebuah kelompok

elit dengan kedudukan tersebut sebagai sumber kekuasaannya, yang kemudian secara perlahan menancapkan kekuasaannya.

Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia, ketika liberalisasi politik dan desentralisasi membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut berkontestasi dalam Pilkada dan Pemilu. Raja-raja lokal yang telah lama termarjinalkan pada masa orde baru, kembali muncul sebagai aktor dalam arena politik lokal. Fenomena kembalinya para elit bangsawan lokal ke dalam tampuk kekuasaan seperti yang terjadi di Bima, Ternate, Bone, Wajo, Jeneponto, Soppeng dan beberapa daerah lainnya, berbeda dengan yang terjadi di Polewali Mandar, dimana politik lokal hanya dikuasai oleh tiga klan keluarga yang berasal dari keturunan raja atau bangsawan lokal.

Dari hasil wawancara dengan saudara Muh.syahid, yang mengatakan bahwa:

Sesuai informasi sejarah yang saya dapatkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar ada tiga tokoh utama yang menguasai pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar atau dulunya kita kenal Kabupten Polewali Mamasa yaitu 3M (keluarga Masdar, Mengga dan Manggabarani). Maka dari itu di Polewali Mandar bisa dibilang terjadi klan Politik. Menurut saya terjadinya politik klan di polewali mandar memiliki dampak positif maupun negatif khususnya didalam pemerintahan polewali mandar. Adapun dampak positifnya yaitu pembangunan polewali Mandar bisa lebih maju lagi serta masyarakat mudah berinterkasi dengan pemimpin daerahnya sendiri disebabkan pemimpinnya berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi dampak negatif yaitu tidak memberikan kesempatan sepenuhnya untuk orang lain agar terlibat di pemerintahan Polewali Mandar .³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan saudara Muh.Syahid, pekerjaan:akademisi/mahasiswa, umur 21 tahun. Pada Hari/tanggal: kamis, 10 Maret 2016. Pukul 16.00.

Ketiga klan keluarga yang mendominasi sirkulasi elit di Polewali Mandar tersebut merupakan keturunan dari bupati-bupati Polewali Mamasa atau yang sejak tahun 2005 bernama Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu dari ke-tiga klan tersebut adalah klan keluarga Andi Masdar Pasmar. Terbentuknya politik klan Andi Masdar Pasmar dapat diketahui melalui :

1. Munculnya Andi Masdar Pasmar dalam politik polewali mamasa-mandar.

Klan keluarga yang pertama terbentuk di Kabupaten Polewali Mandar adalah klan Andi Masdar Pasmar yang merupakan keturunan dari bupati Polewali Mandar yang kelima yakni Kol. H. Andi Saad Pasilong (1995-1998) yang juga telah menjabat sebagai bupati Polewali Mandar. Dilantiknya Kol. H. Andi Saad Pasilong yang merupakan “putra daerah” dan memiliki latar belakang ABRI menjadi bupati Polewali Mandar yang kelima (1995-1998) menandai lahirnya kembali kelompok elit dari klan yang pertama dalam masyarakat Mandar.

Munculnya Andi Masdar Pasmar diranah perpolitikan di Polewali Mamasa-Mandar berawal dari menjadi salah satu Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (sebelum terjadi pemekaran Sulawesi Barat).

Selanjutnya Andi Masdar Pasmar terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000 serta menjadi Ketua Umum DPD II Golkar pada masa itu. Tidak lama kemudian beliau juga diangkat menjadi Camat Campalagian dan selanjutnya Camat Polewali di Kabupaten Polewali Mamasa-Mandar.

2. Regenerasi politik klan Andi Masdar Pasmari

Ketika raja mesti berganti, para anak raja pun bersaing menduduki takhta. Saat pemilihan, seorang pa'lonlara terlebih dulu membacakan semacam rekam jejak para kandidat berikut para nenek moyang mereka. Barulah kemudian kaum adat menjadi penentu siapa raja berikutnya.

Begitulah proses suksesi kerajaan-kerajaan di tanah mandar pada masa lalu. Mandar merupakan tanah dengan *pitu ba'bana binanga* (tujuh kerajaan di muara sungai) dan *pitu ulunna salu* (tujuh kerajaan di hulu sungai). Pada masa penjajahan, wilayah ini masuk Afdeling Mandar. Pada awal masa kemerdekaan, wilayah itu termasuk dalam Swatantra Mandar yang masuk Provinsi Sulawesi. di masa lalu pun raja di wilayah Mandar dipilih dan tidak ada sistem putra mahkota. Persaingan antar saudara jamak terjadi dalam kerajaan-kerajaan di tanah Mandar. demokrasi, meski terbatas, sudah berjalan di masa lalu. Kini proses suksesi diperluas, rakyat biasa pun menjadi penentu pemilihan.

Bergesernya kembali peta perpolitikan ditingkat Nasional pada kurun waktu tahun 1990-1998, dimana pada kurun waktu itu pemerintah pusat lebih memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, sehingga kewenangan yang besar untuk mengangkat dan melantik seorang bupati dimiliki oleh gubernur, sistem inilah yang kemudian memberikan peluang bagi kelompok klan yang lain untuk mendapatkan dan menancapkan kekuasaannya. Keberhasilan sistem reproduksi elit dalam satu klan keluarga mulai terlihat dari

bupati Polewali Mandar yang kelima (1995-1998) yakni Kol. H. Andi Saad Pasilong, yang merupakan keturunan klan yang pertama Andi Masdar Pasmar.

Setelah 42 tahun silam Andi Ali Baal Masdar lahir. Karena ayahnya dipindah tugaskan ke Polmas menjabat Camat Campalagian selanjutnya Camat Polewali. Ali kecilpun ikut diboyong ke kampung halamannya. Sebagai pejabat pemerintah daerah, Masdar Pasmar menetap di rumah Dinas Pemerintah Daerah dikawasan Kompleks Pekkabata Polewali.

Genap dua tahun setelah menyelesaikan S2 di UNHAS, Makassar, Ali Baal kembali lagi ke Polmas, di Kecamatan Tapango, kampung leluhurnya dari jalur ayah, dipercayakan sebagai kepala kecamatan persiapan, tapi sebelum itu ia ditugaskan di bagian kepegawaian dan bagian hukum pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa. Setelah dari Tapango, sempat menjabat Sekretaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kabupaten Polewali Mamasa, namun tak lama. terbentuklah “tangga” atas lebih akan segera diraih. Bahkan mungkin melebihi ukuran yang dirasakannya sendiri menjadi Bupati Polewali Mamasa/ Polewali Mandar Termuda dengan masa jabatan dua periode dari Fraksi Partai Golongan Karya. Dan kini Beliau Maju Menjadi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun periode 2017-2022 dari fraksi partai Gerindra.⁴⁰

⁴⁰ Sarman Sahuding, *Dalam Sejarah Akan Dikenang “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati Di Sulawesi Barat 1960-2005*. (Majene, Sulawesi Barat : Yayasan Tinta Mandar Sulawesi Barat, Januari 2006), hal. 85.

Tahun 2004-2008 dan periode 2008-2014 selama dua periode tersebut, pola sirkulasi elit dari klan pertama tersebut kembali terjadi, selama kurun waktu tersebut Andi Ali Baal Masdar, yang merupakan keturunan dari bupati Polewali Mandar yang kelima yang merupakan generasi klan pertama Andi Masdar Pasmal, kembali menjabat sebagai bupati Polewali Mandar selama dua periode. Fenomena sirkulasi elit yang berputar diantara ketiga klan elit yang saat ini ada, seolah menutup ruang bagi individu-individu yang berada diluar ketiga klan tersebut untuk ikut berkontestasi dalam setiap proses pemilihan di Kabupaten Polewali Mandar, bahkan dalam susunan nomor urut internal partai besar dalam pemilihan legislatif elit dari luar ketiga klan tersebut hanya ditempatkan di orbit terluar pencalonan. Sementara itu, mereka yang merupakan klan dari ketiga keluarga tersebut dan jejaringnya berada pada pusat orbit pencalonan.

Awalnya Ali Baal diusung oleh Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Polmas untuk maju menjadi bupati, akan tetapi Ali Baal menolak tawaran tersebut dengan alasan ia tidak mau bersaing dengan ayahnya yang juga maju mencalonkan sebagai bupati yang juga saat itu menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar. Perkembangan suksesi dari waktu ke waktu, Ali dibujuk oleh DPD KNPI Polewali Mamasa untuk maju selaku bupati melalui fraksi Golkar. Bola ini terus bergulir. Disamping kondisi kesehatan ayahnya yang sudah kian tak membaik. Arah politik pun terputar Andi Ali Baal Masdar akhirnya ditetapkan oleh fraksi Golkar untuk berpasangan dengan H.M Yusuf Tuali, sebagai bupati dan wakil bupati, dan pasangan ini pun resmi sudah.

Tapi Ali Baal tak sertamerta “ tunduk” pada ajakan fraksi dan partai yang mencalonkannya. Terlebih dahulu dibangun negosiasi politik yang berarti. Apa Ia mau menerima diusulkan sebagai bupati , pertama, kalau kelak ia jadi Bupati Polmas ia tak mau diintervensi oleh partai yang mencalonkannya, termasuk tak boleh ada intervensi keluarga. Kedua,Ia tak mau ada watak keluarga yang sombong hanya karena ia telah menjadi bupati Polewali Mamasa.

Ketiga, ia tak mau dijadikan tempat “ pencari uang” oleh partai yang mencalonkannya (Partai Golkar). Kenapa ini penting digarisbawahi, sebab akan mengganggu performance bupati nantinya. Arti dalam bagi Ali Baal, bahwa sumbangsih terbesarnya kepada partai ketika ia sudah melaksanakan tugas dengan baik selaku bupati Polewali Mamasa dan dinilai sukses oleh masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang paling penting dari semuanya. Dan rupanya partai Golkar-partai yang mengusungnya- sepakat akan hal itu.⁴¹

Ketika pemilihan bupati berlangsung, Andi Ali Baal Masdar Pasmars, Drs.HM.Yusuf Tuali melenggang, menang dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Polewali Mamasa periode tahun 2004-2009.Akan tetapi karena kepercayaan masyarakat Polewali Mandar masih sangat kuat terhadap beliau, maka beliau terpilih kembali menjadi bupati Polewali Mandar dengan masa bakti 2009-2014. Setelah masa bakti ke dua dari Andi Ali Baal Masdar selesai, dilanjutkan lagi oleh saudara

⁴¹ Sarman Sahuding, *Dalam Sejarah Akan Dikenang “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati Di Sulawesi Barat 1960-2005.*(Majene, Sulawesi Barat : Yayasan Tinta Mandar Sulawesi Barat, Januari 2006), hal. 85-86.

kandung beliau yakni bapak Andi Ibrahim Masdar yang saat ini menjabat sebagai bupati Polewali Mandar dengan masa jabatan 5 tahun.

Beberapa regenerasi klan pertama Andi Masdar Pasmal juga ikut terlibat di ranah pemerintahan baik yang bersifat formal maupun informal, seperti :

NAMA	JABATAN
1. Andi Masdar Pasmal	Andi Masdar Pasmal adalah salah satu Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, Ketua Umum DPD II Golkar pada masa itu. Kemudian beliau juga diangkat menjadi Camat Campalagian selanjutnya Camat Polewali.
2. Andi Ali Baal Masdar	Bupati Mamasa periode tahun 2004-2009. Akan tetapi karena kepercayaan masyarakat Polewali Mandar masih sangat kuat terhadap beliau, maka beliau terpilih kembali menjadi bupati Polewali Mandar dengan masa bakti 2009-2014.
3. Andi Ibrahim Masdar	Andi Ibrahim Masdar salah seorang anak dari Masdar Pasmal merupakan aktivis Organisasi Kepemudaan dan Politik (1988- hingga sekarang),

	<p>Andi Ibrahim Masdar juga seorang Pengusaha Hasil Bumi. Pada tahun 1999-2004 menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi Partai Golongan Karya. Terlibat dalam organisasi seperti: Ketua Gerakan Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1988-1995); Ketua Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-1996); Ketua DPD AMPI Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-1998); Ketua AMPG Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1997-2003); Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1997-2003); Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Polewali Mandar tahun (2003-2009); Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Polewali Mandar tahun (2004-2009); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun (2005-2010); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat</p>
--	--

	<p>tahun (2011-2016). Selain itu Andi Ibrahim Masdar juga menjabat Ketua Dewan Penasehat GP. ANSOR Provinsi Sulawesi Barat tahun (2005-2010); Ketua Harian Pengda PSSI Provinsi Sulawesi Barat tahun (2006-2011); Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun (2007-sekarang); Ketua Kerukunan Keluarga Besar PALILI Kabupaten Polewali Mandar tahun (2005-sekarang) dan Ketuan Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Barat tahun (2012- sekarang). Dan kini menjabat sebagai bupati Polewali Mandar.</p>
4. (Alm) Andi Baso Masdar	<p>Ketua DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Barat yang juga merupakan seorang pengusaha Minyak terbesar besar di Polewali Mandar, beliau juga tercatat sebagai calon Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat I.</p>
5. Andi Nursyami Masdar	<p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>

	Kabupaten Polewali Mandar yang sampai saat ini masih menjabat.
6. Andi Masri Masdar	Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Polewali Mandar dan ketua PMI cabang Polewali Mandar sekaligus Lurah Polewali.
7. Istri Andi Ali Baal Masdar yakni Andi Ruskati Ali Baal	aktif memimpin Organisasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Polewali Mandar sebagai Ketua pada tahun (2004-2013). Pada tahun 2013 Andi Ruskati Bergabung menjadi Kader Gerindra dan Pilihan Legislatif 2014 mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Andi Ruskati Terpilih menjadi anggota DPR-RI Periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VIII di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan agama.

Sesuai dengan apa yang diutarakan di atas memang pada dasarnya sudah terjadi sirkulasi aktor politik di keluarga Andi Masdar Pasmal dilihat bagaimana anggota keluarga Andi Masdar Pasmal selalu bergantian dalam menduduki jabatan

politik, mereka tidak pernah ketinggalan untuk ikut serta dalam proses pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga bisa dikatakan politik klan pun terjadi di keluarga Andi Masdar Pasmal ini. Karena Secara substantif penyegaran wajah elit politik tidak terjadi karena elit yang saat ini berkuasa sedang bermetamorfosis dan mewariskan kekuasaannya kepada mereka yang memiliki hubungan darah dengannya. Perubahan rezim kekuasaan dalam sistem politik dari rezim otoriter ke demokrasi membawa pergeseran penting bagi bangunan politik Indonesia, dari pusat hingga daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, lokal maupun Nasional untuk memperoleh ruang politik.

Sehingga dalam wawancara dengan saudara bapak Baharuddin Yusuf yang menyatakan bahwa :

*Memang betul, di ranah pemerintahan/politik di Kabupaten Polewali Mandar ini nama Keluarga Andi Masdar Pasmal itu selalu ada di setiap pemilihan umum baik itu pemilihan bupati ataupun pemilihan gubernur, keluarga Andi Masdar Pasmal ini pun bisa dikatakan menjadi tokoh pengikut masyarakat Kabupaten Polewali Mandar ini, mereka sangat mudah merangkul masyarakat Kabupaten Polewali Mandar ini, apalagi pada saat di setiap pemilihan-pemilihan umum.*⁴²

B. Klanisasi politik Andi Masdar Pasmal

Sesuai dengan hasil peneliti di lapangan mengenai klanisasi politik Andi Masdar Pasmal itu dapat terlihat melalui terlibatnya para anggota keluarga Andi Masdar Pasmal tersebut di ranah politik melalui beberapa jalur politik seperti :

⁴²Hasil wawancara dengan saudara bapak H. Baharuddin yusuf, pekerjaan: wiraswasta, umur: 55 tahun. Hari/tanggal : Senin,1 Februari 2016. Pukul.17.00.

1. Melalui Pileg (Pemilihan Legislatif)

Awal keterlibatan Andi Masdar Pasmal diranah politik itu melalui pileg (Pilihan Legislatif) , dilihat dari jabatan awal yang diduduki oleh Andi Masdar Pasmal adalah salah satu Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, Ketua Umum DPD II Golkar pada masa itu. Kemudian beliau juga diangkat menjadi Camat Campalagian selanjutnya Camat Polewali. Andi Ibrahim Masdar pun pada Tahun 1999-2004 menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi Partai Golongan Karya. Selain Andi Masdar Pasmal, diantara generasinya pun juga ikut terlibat pada pemilihan legislatif, seperti yang tercantum dibawah ini :

- a. Andi Ibrahim Masdar merupakan putra dari Andi Masdar Pasmal yang terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 1999-2004, kemudian selanjutnya terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi Partai Golongan Karya.
- b. Putra selanjutnya ialah (alm) Andi Baso Masdar yang menjadi Ketua DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Barat.
- c. Generasi selanjutnya ialah Istri dari Andi Ali Baal Masdar yang merupakan salah satu putra Andi Masdar Pasmal yakni Andi Ruskati Ali Baal. Andi Ruskati merupakan menantu dari Andi Masdar Pasmal yang bergabung menjadi kader Gerindra pada tahun 2013 dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan anggota legislatif 2014 yang lalu.

2. Melalui Partai dan Organisasi

Selanjutnya jalur yang menjadi kunci keluarga Andi Masdar Pasmal untuk terlibat diarah perpolitikan Polewali Mandar adalah melalui jalur partai dan organisasi. Seperti yang diketahui bahwa terpilihnya Andi Masdar Pasmal menjadi ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000 itu tidak terlepas dari dukungan partai, yang dimana terpilihnya menjadi ketua DPRD berasal dari fraksi partai Golkar, terpilihnya Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati Polewali Mandar dari fraksi Golkar. Adapun diantara generasi (putra-putri) Andi Masdar Pasmal yang terlibat dalam partai maupun organisasi dapat terlihat pada penjelasan berikut ini :

- a. Dukungan untuk Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati berawal dari usulan oleh Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Polewali Mamasa untuk maju menjadi bupati, akan tetapi Andi Ali Baal Masdar menolak tawaran tersebut dengan alasan ia tidak mau bersaing dengan ayahnya yang juga maju mencalonkan sebagai bupati yang juga saat itu menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar. Perkembangan suksesi dari waktu ke waktu ,akhirnya Andi Ali Baal Masdar dibujuk oleh DPD KNPI Polewali Mamasa untuk maju selaku bupati melalui fraksi Golkar.
- b. Andi Ibrahim Masdar. Andi Ibrahim Masdar merupakan salah satu putra Andi Masdar Pasmal yang terlibat dalam partai seperti menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1997-2003), menjadi Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten

Polewali Mandar tahun (2003-2009, kemudian Andi Ibrahim Masdarpun juga banyak terlibat di berbagai organisasi sehingga memiliki banyak jaringan, seperti menjadi aktivis Organisasi Kepemudaan dan Politik (1988- hingga sekarang), Andi Ibrahim Masdar juga seorang Pengusaha Hasil Bumi. Pada tahun 1999-2004 menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dari fraksi Partai Golongan Karya.

Terlibat dalam organisasi seperti: Ketua Gerakan Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1988-1995); Ketua Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-1996); Ketua DPD AMPI Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1992-1998); Ketua AMPG Kabupaten Polewali Mamasa tahun (1997-2003); Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Polewali Mandar tahun (2004-2009); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun (2005-2010); Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun (2011-2016).

Selain itu Andi Ibrahim Masdar juga menjabat Ketua Dewan Penasehat GP. ANSOR Provinsi Sulawesi Barat tahun (2005-2010); Ketua Harian Pengda PSSI Provinsi Sulawesi Barat tahun (2006-2011); Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun (2007- sekarang); Ketua Kerukunan Keluarga Besar

PALILI Kabupaten Polewali Mandar tahun (2005- sekarang) dan Ketuan Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Barat tahun (2012- sekarang).⁴³

- c. (alm) Andi Baso Masdar juga merupakan putra dari Andi Masdar Pasmar. Sebelum beliau di panggil oleh sang Maha Kuasa, beliau sempat menjabat sebagai Ketua DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Barat.
- d. Andi Masri Masdar yang merupakan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Polewali Mandar dan ketua PMI cabang Polewali Mandar sekaligus Lurah Polewali.
- e. Andi Nursyami Masdar Merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang sampai saat ini masih menjabat.

3. Melalui Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

keterlibatan keluarga Andi Masdar Pasmar diranah politik bukan hanya di ranah partai/organisasi ataupun di legislatif. Akan tetapi keluarga ini pun juga terlibat didalam Pilkada seperti berhasilnya Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati Polewali Mandar selama dua periode kemudian dilanjutkan lagi oleh saudaranya Andi Ibrahim Masdar menjadi bupati Polewali Mandar sampai saat ini.

Pola penetrasi keluarga Andi Masdar Pasmar menggunakan mekanisme politik yang demokratis yakni melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada).

⁴³ Dikutip dalam buku : Pokok-Pokok Pemikiran yang berjudul. Visi dan Misi Program 100 Hari, Gerakan Membangun Polewali Mandar dari Desa. (Profil Singkat Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar 2104-2018).

Pola demokrasi menjadi pilihan yang masuk akal dalam sistem politik yang tersedia.

Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini :

Sesuai hasil wawancara dengan saudara Ibrahim Arif yang menyatakan bahwa:

Tidak bisa dipungkiri di Kabupaten Polewali Mandar memang sudah terjadi yang namanya politik klan terutama di keluarga Andi Masdar Pasmar. Diawali dengan bagaimana keluarga ini sudah lama terlibat di ranah politik mulai dari nenek moyang mereka dan sampai saat ini anak-anak mereka pun menjadi penerusnya, diantaranya adalah Andi Ali Baal Masdar yang pernah menjabat sebagai bupati Polewali Mandar selama dua periode dan kini mencalonkan sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022, kemudian dilanjutkan oleh adiknya Andi Ibrahim Masdar yang sekarang menjabat Bupati Polewali serta saudara lainnya yang juga memiliki jabatan di ranah pemerintahan. Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan mengapa keluarga beliau selalu terlibat ke ranah politik disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengingatkan tentang larangan terjadinya politik klan, di satu sisi mereka juga punya dasar yakni mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin sehingga kebanyakan masyarakat Polewali Mandar tetap menaruh pilihannya kepada keluarga Andi Masdar Pasmar tersebut.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa keluarga Andi Masdar Pasmar menggunakan jaringan demokrasi. Mereka tidak membentuk dinasti politik, melainkan menggunakan sistem pemilihan.

C. Faktor Penentu Klan Andi Masdar Pasmar

Secara teoretis, para keluarga/kerabat/kelompok politik menggunakan berbagai modal sebagai basis legitimasi kekuasaan. Mayoritas studi di Indonesia lebih fokus pada dua hal: fenomena politis yang terjadi setelah para aktor politik berhasil mendapatkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa sehingga terciptalah oligarki, dan proses-proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan

⁴⁴Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, saudara Ibrahim Arif, pekerjaan: wiraswasta, umur: 34 tahun. pada hari/tanggal: Rabu, 27 Januari 2016. Pukul. 11.00.

(kepiawaian mengelola modal politik) sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan. Sesuai hasil yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan analisis teori modal yang digunakan, keluarga Andi Masdar Pasmawati menggunakan beberapa modal, diantaranya:

1. Modal Politik

Keluarga Andi Masdar Pasmawati pada dasarnya memang memiliki modal politik yang sangat kuat karena dilihat dari awal munculnya keluarga Andi Masdar Pasmawati di ranah politik itu berasal dari partai Golkar. Andi Masdar Pasmawati adalah salah satu Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, Ketua Umum DPD II Golkar pada masa itu Andi Masdar Pasmawati merupakan anggota legislatif DPD II., kemudian terpilihnya Andi Ali Baal Masdar jadi bupati dari fraksi partai Golkar dan sekarang mencalonkan sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022 dari fraksi partai Gerindra. Sehingga eksistensi politik keluarga Andi Masdar Pasmawati tidak terlepas dari dukungan penuh dari fraksi partai yang mereka masuki. Selain partai mereka juga mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi.

Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan dalam pemilu.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A. Hick dan J.Mirsa mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, Modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kementiasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum. Jadi, modal politik yaitu : kepemilikan jabatan politisi, adanya dukungan dari parpol tertentu dan adanya tim sukses yang solid

Sesuai dengan hasil wawancara dengan asisten atau staf ahli politik dan hukum bupati. Yang dimana saudara mengatakan bahwa:

Bahwa selain dari tidak adanya aturan tentang larangan terjadinya politik klan, keikutsertaan keluarga Andi Masdar Pasmari ini berawal dari beberapa faktor diantaranya, faktor keturunan (nenek moyang) mereka yang dulunya sudah berkecimpung di ranah politik, mereka juga punya kemampuan di ranah politik (mampu berpolitik) disebabkan mereka sudah dididik sejak anak-anak sampai memasuki usia dewasa untuk bergelut di dunia politik praktis, mereka punya modal dan mereka juga punya massa/ jaringan yang kuat serta dukungan dari sebahagian masyarakat Polewali Mandar yang begitu besar.⁴⁵

2. Modal Sosial

Adapun faktor yang mempengaruhi bertahannya eksistensi politik keluarga Masdar Pasmari adalah untuk berkecimpung di ranah politik yakni awalnya mereka

⁴⁵Hasil wawancara dengan bapak Dr. H. Sarja, M.Si., asisten/staf ahli politik dan hukum kantor bupati, umur: 56 tahun. Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Februari 2016.

punya dasar yang berlandaskan pada keturunan mereka, dimana keturunan mereka itu merupakan salah satu tokoh yang berperang penting pada saat masa peperangan untuk merebut Kemerdekaan Khususnya di tanah Mandar di Kabupaten Polewali Mamasa dahulu. Mereka mempunyai keturunan yang dahulunya merupakan tokoh Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mamasa. Selain itu mereka juga berasal dari keturunan bangsawan (Mara'dia), yang dimana Mara'dia ini merupakan salah satu Tokoh Masyarakat di tanah Mandar yang sangat di segangi dan di hormati.

Oleh karena itu, keturunan mereka sudah menjadi kepopuleran di masyarakat, mereka sudah tidak asing lagi di mata masyarakat khususnya di Polewali Mandar sejak dahulu sampai saat ini disebabkan keluarga mereka sudah masuk dalam rentetan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam sejarah di tanah Mandar. jadi sebahagian masyarakat Polewali Mandar tidak heran lagi jika mereka mau berkecimpung di ranah politik, maka dari itu masyarakat Polewali Mandar memberikan dukungan kepada keluarga mereka di sebabkan masyarakat sudah mengetahui bagaimana keluarga ini memiliki pengetahuan politik bahkan mereka sudah memiliki darah kepemimpinan dari Nenek Moyang mereka.

Itulah sebabnya keluarga ini ikut terlibat di dalam ranah politik karena mereka punya modal terutama punya modal social, dimana modal social yang di maksud adalah mereka sudah mendapatkan kepercayaan dari kalangan masyarakat Polewali Mandar. Itulah sebab mereka sangat termotivasi untuk masuk ke ranah politik

disebabkan atas dukungna masyarakat sendiri, keluarga mereka sudah punya Massa untuk mendorong mereka ikut terlibat di ranah politik.

Sesuai hasil wawancara dengan saudara Jamaluddin, yang menyatakan bahwa:

Eksistensi keluarga Andi Masdar Pasmal yang saat ini menjadi perbincangan di masyarakat itu tidak terlepas dari ikatan sosial yang sangat kuat terhadap masyarakat Polewali Mandar, artinya keluarga Andi Masdar Pasmal ini disukai oleh masyarakat sebab keluarga ini punya jiwa sosial, jiwa persaudaraan terhadap masyarakat atau jiwa tali silaturahmi kepada seluruh masyarakat serta berjiwa agamis (religius).⁴⁶

Selain dari hasil wawancara di atas teori modal sosial pun beranggapan demikian seperti Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial dibagi dalam dua kelompok. Pertama : menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), sedangkan kelompok kedua : lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Modal sosial menurut Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang memiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Agama/Guru honorer, umur:38 tahun. Pada hari/tanggal: Kamis, 04 Februari 2016. Pukul. 16:05.

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk modal sosial (*social capital*) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Jadi, inti dari modalitas sosial yaitu: (1) adanya kepercayaan dari masyarakat, (2) adanya interaksi sosial dan (3) adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

3. Modal Ekonomi

Keluarga Andi Masdar Pasmur selain dari golongan bangsawan dan elit, mereka juga di kenal dengan keluarga yang memiliki keadaan ekonomi yang mapan, dikalangan masyarakat dikenal sebagai keluarga yang memiliki pertambangan ikan yang cukup banyak. Kemudian salah satu anaknya merupakan pembisnis minyak (Alm) Andi Baso Masdar Ketua DPD/Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Barat yang juga merupakan seorang pengusaha Minyak terbesar besar di Polewali Mandar.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang

dicalonkannya. Jadi modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumber daya dari dana pribadi dan donator, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk kemenangan pemilihan umum. (Adanya dukungan dana dan adanya kepemilikan alat produksi atau perusahaan).

4. Modal Simbolik

Menurut Pierre Bourdieu, pada dasarnya, modal simbolik (seperti prestise, kehormatan atau charisma) ialah modal lainnya ketika diketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan simbolis yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal simbolik merupakan hasil transformasi dari modal ekonomi, sosial dan kultural ke dalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan besar.⁴⁷

Salah satu yang menjadi modal simbolik Keluarga Andi Masdar Pasmara adalah karena keluarga ini mempunyai keturunan yang dahulunya merupakan tokoh Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mamasa. Selain itu mereka juga berasal dari keturunan bangsawan (Mara'dia), yang mana keturunan Mara'dia ini merupakan salah satu tokoh masyarakat di tanah Mandar yang sangat di segangi dan di hormati sehingga golongan tersebut dulunya dan sampai saat ini menjadi suri tauladan

⁴⁷Haryanto. *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*.(Yogyakarta : Polgom, 2014), Hal. 17.

dikalangan masyarakat Polewali Mandar. Melihat jalur keturunan keluarga Andi Masdar Pasmal yang berasal dari keturunan bangsawan, Andi/puang (mara'dia) yang dimana kalangan tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, dikalangan masyarakat Polewali Mandar pun sangat menghormati keturunan-keturunan tersebut. Oleh sebab itu Andi Masdar Pasmal sampai kepada keturunannya (anak dan cucunya) sangat di hormati oleh masyarakat Polewali Mandar.

Sesuai hasil wawancara dengan saudara Muh. Yakub, mengatakan bahwa:

*Selain modal sosial, politik, ekonomi dan simbolik, eksistensi keluarga Masdar Pasmal sebenarnya juga tidak terlepas dari bagaimana jaringan-jaringan mereka terhadap masyarakat Polewali Mandar sangat kuat sehingga mereka bisa dibilang sudah mendapatkan dukungan penuh dari sebagian masyarakat Polewali Mandar, selain itu juga mereka sangat menjunjung tinggi sebuah tali silaturahmi. Oleh karena itu didalam keluarga Masdar Pasmal memiliki nilai kekerabatan yang sangat erat. Selain itu mereka juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan baik dilingkungan sesama kerabatnya maupun dikalangan masyarakat sebab mereka juga berasal dari keluarga yang berketurunan puang yang sangat dihormati oleh masyarakat Polewali Mandar.*⁴⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

⁴⁸ Hasil wawancara dengan saudara Muh. Yakub, Tokoh Masyarakat, Pekerjaan: Guru. Umur: 47 tahun. hari/tanggal :Senin, 15 Februari 2016. Pukul 14.30.

Kesimpulan

Klan yang terbentuk di Kabupaten Polewali Mandar ada tiga (klan Masdar, klan Mengga dan klan Manggabarani). Terbentuknya klan politik Andi Masdar Pasmardar di Kabupaten Polewali Mandar dapat diketahui melalui awal munculnya Andi Masdar Pasmardar sebagai salah satu aktor diranah politik di Kabupaten Mamasa, kemudian dilanjutkan oleh regenerasi (anak-anaknya) diantaranya : Andi Ali Baal Masdar, Andi Ibrahim Masdar, (Alm) Andi Baso Masdar, Andi Nursyami Masdar, Andi Masri Masdar dan menantunya Istri Andi Ali Baal Masdar bernama Andi Ruskati Ali Baal. Ada beberapa jalur yang dilalui regenerasi keluarga Andi Masdar Pasmardar untuk terlibat diranah politik seperti melalui pilihan legislatif , melalui partai/organisasi dan melalui pilkada/pilgub. Terlibatnya keluarga Andi Masdar diranah politik memiliki dasar seperti mereka memiliki modal politik, modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolik sehingga mereka terus bertahan diranah politik sampai saat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan klan politik Andi Masdar Pasmal di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari keterlibatan keluarga Andi Masdar Pasmal ini di ranah politik yang terus mengalami pergantian. Awal pembentukan politik klan Andi Masdar Pasmal dapat diketahui melalui awal munculnya Andi Masdar Pasmal di ranah politik sebagai Pejabat Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 1995-2000, menjadi Ketua DPD II Golkar pada masa itu, setelah meninggalnya Andi Masdar Pasmal, muncullah regenerasinya yang dimulai dari anaknya Andi Ali Baal Masdar selaku pelanjut utama kekuasaan Andi Masdar Pasmal yang menjabat sebagai bupati Polewali Mandar selama dua periode, Andi Ibrahim Masdar yang saat ini menjabat sebagai bupati Polewali Mandar, (Alm) Andi Baso Masdar sempat menjadi Ketua DPD/umum Partai Gerindra Sulawesi Barat, Andi Nursyami Masdar yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Andi Masri Masdar yang juga menjabat sebagai ketua KNPI dan ketua PMI cabang Polewali Mandar dan menantunya yang merupakan istri dari Andi Ali Baal Masdar yang bernama Andi Ruskati Ali Baal juga menjabat sebagai anggota DPR-RI Periode 2014-2019 dan duduk di komisi VIII di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan agama. Adapun jalur yang dilalui keluarga Andi Masdar Pasmal melalui jalur yang mereka tempuh seperti memasuki ranah politik melalui jabatan

pilihan legislatif (menjadi Ketua Umum DPD II Golkar), berkecimpung didalam partai/organisasi(seperti Andi Ibrahim Masdar yang memimpin banyak organisasi KNPI, menjadi ketua PMI dan selalu terlibat disetiap pemilihan umum baik pemilihan pilkada atau pilgub (Andi Ali Baal Masdar menjadi bupati selama dua periode dan dilanjutkan lagi oleh adiknya Andi Ibrahim Masdar).

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi politik klan di keluarga Masdar Pasmad adalah disebabkan keterlibatan keluarga ini diranah politik yang sampai saat tetap bertahan. Sesuai dengan hasil peneliti dilapangan dengan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai bertahannya eksistensi mereka diranah politik itu disebabkan beberapa faktor diantaranya:mereka memiliki modal politik seperti : mereka mendapatkan dukungan dari partai yang mereka masuki salah satunya partai Golkar dan kini Ali Baal Masdar mendapat dukungan dari partai Gerindra untuk mencalonkan sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022, memiliki modal sosial seperti memiliki jaringan yang kuat di kalangan masyarakat sehingga mendapatkan dukungan/respon yang baik dari masyarakat , memiliki modal ekonomi (mereka berasal dari keturunan yang memiliki keadaan ekonomi yang sudah mapan, berasal dari kalangan pengusaha dan mereka juga memiliki modal simbolik (mereka berasal dari keturunan bangsawan atau Mara'dia dimana sesuai sejarah di tanah mandar bahwa orang yang memiliki keturunan bangsawan atau mara'dia dulunya bahkan sampai saat ini menjadi suri tauladan dikalangan masyarakat Polewali Mandar sehingga masyarakat sangat menghormati keturunan tersebut).

B. Saran

Kekuasaan yang berdasarkan keluarga dan kerabat itu tidak memberi peluang bagi orang lain untuk mendapatkan persamaan hak dalam politik dan pemerintahan. Maka dari itu pada dasarnya Politik klan tidak bisa dibentuk karena merupakan sebuah permasalahan yang akan berdampak pada sistem pemerintahan yang ada dapat menghambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Akan tetapi, di Daerah Kabupaten Polewali Mandar khususnya, Politik Klan itu bisa saja dibangun selama orang-orang yang terlibat didalamnya itu memang sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke politik dan pemerintahan (mempunyai kapabilitas, kemampuan, pengalaman serta dasar yang dimilikinya) serta merupakan orang yang memiliki sifat penyayang dan cinta terhadap daerah itu sendiri. Seperti **Pesan Terakhir Dari I Mayangbungi – Mara'dia Mandar** atau yang bergelar To dilaling merupakan raja pertama kerajaan Balanipa. *"Madondong duambongi anna matea" mau ana"u mau appou, da muannai menjari Mara"dia mua" tania to namaasayangngi litaq, da muannai dzai" dipe"uluang mua" masu"angi pulu-pulunna, mato"dori kedzona, apa iyamo tu"u namarrupu-ruppu" banua"1.*

Artinya : Besok atau lusa manakala saya mangkat, walau dia itu anakku ataupun cucuku, janganlah hendaknya diangkat menjadi raja, kalau bukan orang cinta pada tanah air dan rakyatnya, dan jangan pula diangkat seseorang menjadi raja apabila ia mempunyai tutur kata yang kasar, perbuatan dan tindakan yang kasar pula, karena orang yang demikian yang akan menghancurkan negeri".

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Bandung : Alfabeta, Juni 2014.
- Bangin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Gaus F Gerald and Chandran Kukathas. *Handbook Teori Politik*. Bandung : Nusa Media, 2013.
- Gunawan Jamil dan kawan-kawan. *Desentralisasi Globalisasi Dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES , 2005.
- Haryanto. *Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan)*. Yogyakarta : Polgom, 2014.
- H.Ahmad Asdy. *Sekilas Tentang Mara'dia Tapango (Dalam Rangka Pengukuhan Mara'dia Tapango Oleh Lembaga Adat Tapango)*. Tapango/Polewali Mandar Sulawesi Barat : Yayasan Maha Putra Mandar, 2004.
- Karim Syahrir. *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*. Makassar : Alauddin University Press, 2012.
- Keller Suzanne. *Penguasa Dan Kelompok Elit*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muslim bin al- Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an- Naisaburi “ Shahih Muslim” bab tentang Kepemimpinan, No. Hadis : 3404 tercantum dalam Lidwa Pusaka i- Software – Kitab 9 Imam Hadis.

Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group). Februari, 2013.

Morissa (Andy Corry W. dan Farid Hamid U). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Kencana, 2012.

Pahmi Sy. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Pres (GP Press), April 2010.

Pamungkas Sigit. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta : Institut For Democracy and Welfarism, 2008.

Robert Van Niel. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Sahuding Sarman. *Dalam Sejarah Akan Dikenang “Jejak Langkah Dan Pemikiran Bupati Di Sulawesi Barat 1960-2005”*. Majene, Sulawesi Barat : Yayasan Tinta Mandar Sulawesi Barat, Januari 2006.

Subakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Thoha Miftah. *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia*. Yogyakarta : Matapena Institute Empower, Research and Development, September 2012.

Sumber data resmi terbaru dari : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014.

Skripsi Husman Husain. *Politik Dinasti, Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo Periode 2008-2013 Di Kabupaten Bone*. Dikutip Hari/Tanggal : Kamis, 28 Mei 2015. Pukul : 13.30.

Jurnal Wasisto Raharjo Djati. *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi:*

Dinasti Politik Di Aras Lokal. Vol. 18, No. 2, Juli 2013 : 203-231.

Dipublikasikan oleh : Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI. Diakses

Hari/ Tanggal : Selasa, 7 April 2015. Pukul : 11.07.16 AM.

Jurnal Universitas Indonesia oleh : Wasisto Raharjo Djati. Peneliti Politik LIPI.

Peradaban Di Sulsel Diruntuhkan Dinasti. Selasa, 17 September 2013. 09:01

Dalam situs : <http://makassar.tribunnews.com/2013/09/17/peneliti-politik-lipi-peradaban-di-sulsel-diruntuhkan-dinasti>. Diakses : Selasa, 7 April 2015. Pukul 11.21

Jurnal Dadi Junaedi Iskandar yang berjudul “ *Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena*

Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi”. Dalam situs: [http://www.e-](http://www.e-jurnal.com/2016/02/demokrasi-otonomi-dan-fenomena-politik.html)

[Jurnal.com/2016/02/demokrasi-otonomi-dan-fenomena-politik.html](http://www.e-jurnal.com/2016/02/demokrasi-otonomi-dan-fenomena-politik.html). diakses

Hari/Tanggal: Senin, 18 April 2016. Pukul 18:04.

Jurnal Masda Putri Amelia yang berjudul “ *Membangun Dinasti Politik Melalui*

Penguatan Jejaring Kekuasaan Pada Walikota Probolinggo”. Jurnal Politik

Muda, Vol.4, No.3 Agustus-Desember 2015, 319-327. Dalam situs:

www.journal.unair.ac.id>. Diakses Hari/Tanggal: Senin, 18 April 2016.

Pukul 17:25.

Data resmi dari profil Polewali Mandar. Dalam situs <http://www.polmankab.go.id/sejarah-polewali-mandar/>.diakses Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2016 pukul 10:00.

Data resmi dari situs Kabupaten Polewali Mandar: www.polmankab.go.id >selayang-Pandang-polewali-mandar-2 April/2013. Diakses Hari/Tanggal: Kamis, 4 Februari 2016. Pukul 10:52.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong--Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK UIN ALAUDDIN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH (DEWAN PENGUJI) SKRIPSI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT & POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar **An; Habiba** NIM.30600112031 Jurusan Ilmu Politik tanggal 22 Maret 2016 untuk mendapat Penguji Skripsi dengan Judul :

**"Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar Studi Kasus
(Politik Klan H. Andi Masdar Pasmari di Kabupaten Polewali
Mandar)"**

Menimbang : a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas memenuhi syarat yang diperlukan untuk menempuh Ujian Munaqasyah Skripsi tersebut.
b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Panitia Ujian: Munaqasyah guna persiapan penyelenggaraan Ujian yang dimaksud.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202B tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan MENDIKNAS R.I. Nomor 232 tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia Ujian Munaqasyah (Dewan Penguji) Skripsi;
- Pertama : Panitia bertugas melaksanakan Persiapan Ujian Munaqasyah Skripsi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Fakultas;
- Kedua : Ujian Munaqasyah tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Romang Polong - Gowa
Pada Tanggal : 22 Maret 2016

Dekan,


Prof. Dr. H. Mub. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong--Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : UF/PP.00.9/26/2016
Sifat : Penting
Hal : **Undangan Ujian Skripsi**

Romang Polong, 22 Maret 2016

Kepada Yth:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dr. Tasmin, M.Ag.
(Wakil Dekan I) | (Ketua Sidang) |
| 2. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si. | (Pembimbing) |
| 3. Wahyuni, S.Sos, M.Si. | (Pembimbing) |
| 4. Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA, Ph.D. | (Penguji) |
| 5. Syahrir Karim, M.Si, Ph.D. | (Penguji) |

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Pelaksanaan Ujian Skripsi atas Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Habiba
NIM : 30600112031
Jurusan / Prodi : Ilmu Politik

Maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2016
Jam : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Munaqasyah

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

M A K A S S A R Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.

NIP. 19590704 198903 1 003


Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

**PANITIA PELAKSANAAN UJIAN MUNAQASYAH (DEWAN PENGUJI) SKRIPSI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

Ketua : Dr. Tasmin, M.Ag.
Sekretaris : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.
Munaqisy I : Prof. Dr. Muh. Saleh Tajuddin, MA.
Munaqisy II : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.
Pelaksana : Ernawati, MM

Ditetapkan di : Romang Polong - Gowa
Pada Tanggal : 22 Maret 2016

Dekan,


Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Masing - masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.36, Romang Polong—Gowa ■ (0411) 841879 Fax 8221400

Nomor : UF/PP.00.9/ 81 /2015

Samata, 30 Desember 2015

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. : Bupati Kabupaten Polewali Mandar

Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Polewali Mandar
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan, bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Habiba
NIM : 30600112031
Tingkat/Smt. : Strata Satu (S.1) / VII (Tujuh)
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin, Filsafat & Politik / Ilmu Politik
Ala m a t : Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul :
"Klarisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar. Studi Kasus (Politik Klan H.A.
Masdar Pasmard di Kabupaten Polewali Mandar)"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.
2. Wahyuni, S.Sos, M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di Kab. Polewali Mandar dari tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam

An. Rektor

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HABIBA, Lahir, Wonomulyo 29 Oktober

1993, anak pertama dari empat bersaudara. Anak dari pasangan H.Muh. Daali dan Hj. Halimah. Mengikuti jenjang pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak yaitu TK Idhata. Pada tahun 2000, melanjutkan pendidikan pada jenjang SD di SDN 008 Sidodadi Kec, Wonomulyo dan tamat pada tahun 2006 dan di tahun 2006 melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP di SMPN I Wonomulyo, tamat pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2012. Di tahun 2012 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan ilmu politik di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik selama 3 tahun 6 bulan dan selesai pada tahun 2016 dengan meraih gelar S1, Sarjana Ilmu Politik (S.IP).